



RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL KAB. KUTAI KARTANEGARA



Badan Kesbangpol
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Awang. Sabran Bc.Hk No.63 Telp.(0541) 661518, Fax.(0541) 662602
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : SK-14/BKBP/SET-II/800/02/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah :
1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan dan merumuskan program renja;
 3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renja;
 4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
 5. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 6. Melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 14 Februari 2020



Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : SK-14/BKBP/SET-II/800/02/2020

Tanggal : 14 Februari 2020

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepala Badan | Pengarah | |
| 2 | Sekretaris | Penanggung Jawab | |
| 3 | Kasub.Bag. Penyusunan Program | Ketua | |
| 4 | Kasub.Bag. Keuangan | Wakil Ketua | |
| 5 | Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | |
| 6 | Kabid. Ket. Ekosobud | Anggota | |
| 7 | Kabid. Idiologi dan Wasbang | Anggota | |
| 8 | Kabid. Politik Dalam Negeri | Anggota | |
| 9 | Kasub.Bid. Ket. Ekonomi | Anggota | |
| 10 | Kasub.Bid. Ket. Sosbud | Anggota | |
| 11 | Kasub.Bid. Idiologi dan Kewaspadaan | Anggota | |
| 12 | Kasub.Bid. Pembauran | Anggota | |
| 13 | Kasub.Bid. Fasilitasi Parpol | Anggota | |
| 14 | Kasub.Bid. Fasilitasi Ormas | Anggota | |
| 15 | Darmadian Nur | Anggota | |
| 16 | Mugni | Anggota | |
| 17 | Zaini Ma'ruf | Anggota | |
| 18 | Juminah.HR | Anggota | |
| 19 | Yeni | Anggota | |
| 20 | Agustin Hesti Sutarni | Anggota | |

Ditetapkan di : Tenggarong

pada tanggal : 14 Februari 2020



Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja tahun 2021 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa *input*, *output*, dan *outcome* dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Rencana Kerja 2021 merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang optimal dan terorganisasi.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara | i |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 69 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD | 70 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 83 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 85 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 86 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 86 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD | 89 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 93 |
| 4.1 Program dan Kegiatan | 93 |
| BAB V PENUTUP | 101 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, memanasnya suhu politik pasca Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada tahun 2021 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun Kelima RPJMD 2016-2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2021 sebagaimana perubahan renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di daerah pasca pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yang mengambil tema pembangunan “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Integrasi Data dan Layanan Berbasis Teknologi dan Informasi
2. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Dasar dan Penurunan Kemiskinan
3. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian Daerah Melalui Pertanian, Pariwisata dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja PD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Tentang Ormas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

13. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Renstra tersebut, pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Badan Kesbangpol bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, penurunan kasus penyakit masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database ormas dan parpol. Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019 :

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI 2019 | % PENCA PAIAN | KESIMPULAN |
|--|---|--------|----------------|---------------|--|
| Berkurangnya Potensi Konflik di Masyarakat | Cakupan Penanganan Konflik | 100 % | 100% | 100% | Data dasar Jumlah Konflik dan kejadian konflik pada tahun 2019 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan situasi di Kutai Kartanegara kondusif |
| | Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat | 100 % | 100% | 100% | Gejolak masyarakat pada tahun 2019 mendapatkan penanganan dari Pemerintah |
| Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan | 60% | 58,32% | 97,20% | kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan hanya tingkat kehadiran peserta yang masih kurang |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------|--|
| | Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat | 205 kasus | 318 kasus | 0% | Data tersebut menunjukkan tidak tercapainya target penurunan kasus, namun data dasar tahun 2018 menunjukkan data menurun dari sebelumnya 359 kasus sehingga menurun 41 kasus, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan. |
| Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat | Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | 70 % | 81,24% | 100% | Data Dasar partisipasi Pilkada Gubernur Kaltim Serentak tahun 2018 : 60,44% |
| | Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi | 80% | 40% | 50% | Dari target 30 ormas telah terpenuhinya 12 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan SKT |
| | Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi | 100% | 100% | 100% | Semua partai politik melengkapi berkas adm. Bantuan keuangan |

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol cukup berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2018, dengan perhitungan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja realisasinya memenuhi target sasaran, namun terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2019 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan tahun anggaran 2019 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 95,31 % dan realisasi keuangan sebesar 94,62 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian capaian target program dan kegiatan hingga akhir tahun 2019, secara keseluruhan sebagai berikut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari review renja 2019, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat target kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan yang ada.
 - b. Adanya perubahan jadwal kegiatan
 - c. Masih kurangnya kesadaran para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat serta masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarluaskan kemasyarakatan tentang pesan/materi/aturan yang disampaikan.
 - d. Pelaksanaan Operasi Bersinar (Bersih Sindikat Narkoba) dari kepolisian yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penyakit masyarakat khususnya kasus narkoba
 - e. Masih terdapat Ormas yang belum memahami peraturan perundang-undangan ormas
 - f. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar
2. Terdapat target kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :



- a. Terjalannya koordinasi yang baik antar instansi vertikal dengan lintas OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penanganan kejadian konflik dan gejolak masyarakat yang timbul dan tidak meluas.
 - b. Forum-forum bentukan pemerintah seperti FKUB, FPK dan FKDM telah menjalankan fungsinya dengan baik di lingkungan masyarakat
 - c. Dengan gencarnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga bisa menggugah mereka untuk menyalurkan hak politiknya pada gelaran Pemilu Legislatif/Presiden
 - d. Adanya kepentingan politik yang tinggi yang turut membantu sebaran sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
 - e. Pengaturan jadwal kegiatan terlaksana dengan baik
3. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka langkah yang telah diambil oleh OPD adalah :
- a. Membuat rencana prioritas terhadap program dan kegiatan yang dianggap sebagai pendukung utama capaian target kinerja
 - b. Pengaturan jadwal kegiatan sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia
 - c. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah



- d. Menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan pada triwulan berikutnya

Terhadap capaian program renstra, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi karena banyak kegiatan pendukung capaian program tidak bisa dilaksanakan, dan hal ini akan disesuaikan pada tahun pelaksanaan Renstra berikutnya dengan adanya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2019 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah, dimana telah dilakukan penambahan pagu anggaran, hal ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan sebagaimana diatas, masih diperlukan biaya untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terutama hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 serta tugas-tugas rutin kedinasan lainnya. Dan akan mendukung optimalisasi pencapaian target kinerja.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Kegiatan Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, Kegiatan ini ditambah pagu anggaran dalam rangka pencapaian target program



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

dengan kegiatan rakor serta pengukuhan pengurus FKUB dan FPK pada tingkat kecamatan

- b. Adanya kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional untuk menunjang agenda nasional dalam pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Hari Bela Negara

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, pagu kegiatan ini mengalami penambahan terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan di 10 (sepuluh) kecamatan dalam rangka persiapan menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pilkada serta Peserta Pemilu agar pelaksanaan tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
- b. Kegiatan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan ini dilakukan penambahan pagu dalam rangka memfasilitasi Diklat bagi Ormas Komando Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol tahun 2019 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2019 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja :



Tujuan 1 :

Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur di Lingkungan Badan Kesbangpol.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | | |
|--|--------|-----------|------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 99,32% | 100% | 97,39% |
| Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | - | - | 100% |
| Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari 4 (empat) indikator tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan efisiensi kegiatan dan anggaran, berikut analisis dari 4 (empat) indikator tersebut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

a. Indikator 1 : Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

| URAIAN | TARGET | CAPAIAN | REALISASI |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air | 146 rekening | 144 rekening | 98,63% |
| Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 42 unit | 28 unit | 66,67% |
| Penyediaan Jasa Adm.Keuangan | 180 org/bln | 176 org/bln | 97,78% |
| Jasa Adm. Teknis Perkantoran | 264 org/bln | 246 org/bln | 93,18% |

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air, terdapat 2 rekening yang belum terbayar yaitu rekening hosting website yang tidak digunakan lagi sehingga tidak dibayarkan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran dan 7 (tujuh) unit lainnya dalam keadaan rusak berat.
3. Dalam Jasa Adm. Keuangan, terdapat 1 (satu) orang PNS yang pensiun pada bulan September sehingga honor pengelola keuangan pada bulan September s/d Desember 2019 tidak dibayarkan
4. Dalam Jasa Adm. Teknis Perkantoran, terdapat 1 (satu) orang THL yang berhenti pada Triwulan pertama sehingga honor THL pada tidak dibayarkan untuk 1 (satu) orang.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2018 mengalami penurunan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun 2019 telah terpenuhi. Dan pada tahun 2020 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.



b. Indikator II : Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :



Sarana dan Prasarana SKPD

| No | Nama Barang | Jumlah | Tahun | Kondisi Barang |
|----|----------------------|--------|-------|----------------|
| 1 | Kendaraan Roda Empat | 6 | 2013 | Baik |
| 2 | Kendaraan Roda Dua | 33 | 2013 | Baik |
| 3 | Mesin Foto Copy | 1 | 2013 | Baik |
| 4 | Filling Kabinet | 10 | 2012 | Baik |
| 5 | Lemari Kaca | 2 | 2013 | Baik |
| 6 | Penghancur Kertas | 2 | 2014 | Baik |
| 7 | Papant Tulis | 1 | 2013 | Baik |
| 8 | AC | 30 | 2014 | Baik |
| 9 | Televisi | 14 | 2013 | Baik |
| 10 | Sound System | 1 | 2013 | Baik |
| 11 | Dispenser | 8 | 2013 | Baik |
| 12 | CCTV | 4 | 2013 | Baik |
| 13 | PC | 20 | 2014 | Baik |
| 14 | Printer | 20 | 2014 | Baik |
| 15 | UPS | 10 | 2014 | Baik |

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan karena pada tahun 2019 ini hanya dilaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor dan untuk penataan kearsipan melalui pengadaan Air Conditioner (AC) dan Lemari Filling Kabinet dan kegiatan pemeliharaan namun tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019 ini yaitu 100% sama dengan capaian pada tahun 2018 yang lalu sehingga dalam hal sarana dan prasarana penunjang kerja/operasional para aparatur telah terlaksana dengan baik.



c. Indikator III : Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada indikator ini didukung dengan kegiatan Fasilitasi Tim Bekias, dimana dalam kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi tim bekias pada Badan Kesbangpol dalam melakukan perubahan pada organisasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu tim bekias di tugaskan untuk menciptakan, memodifikasi inovasi terkait pelayanan untuk masyarakat maupun dalam hal peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesbangpol.

Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga belum dapat diukur terkait perbandingan pencapaian pada indikator ini. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan telah menghasilkan 1 (satu) inovasi yaitu "SISUNRAM" Sistem Informasi Penyusunan Program yang dimanfaatkan untuk membantu dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan pembuatan laporan Badan Kesbangpol.

d. Indikator IV : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (cash flow)

Pada awal tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 75.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolving atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2. 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. 2 (dua) dokumen Laporan Barang Milik Daerah per semester

c. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2019 dan juga untuk tahun 2020 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

aspirasi yang masuk telah ditampung dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2018 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan revidi oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Monev.

Sampai dengan akhir tahun 2019 telah dibuat RENJA 2020, LKjIP 2018, LPPD 2018 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2019 baik secara manual baik melalui aplikasi E – MONEV telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2019 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2019 terdapat 26 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2018 sebesar 100%, dan di tahun 2019 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%



Tujuan 2 :

Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Sasaran Strategis II : Berkurangnya Potensi Konflik di Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Penanganan Konflik dan Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis II

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cakupan Penanganan Konflik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I: Cakupan Penanganan Konflik

Untuk capaian indikator pertama, cakupan penanganan konflik Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

Dengan keadaan perkembangan ekonomi cenderung melambat sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan harus mengadakan rasionalisasi jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi operasional perusahaan. Terjadinya

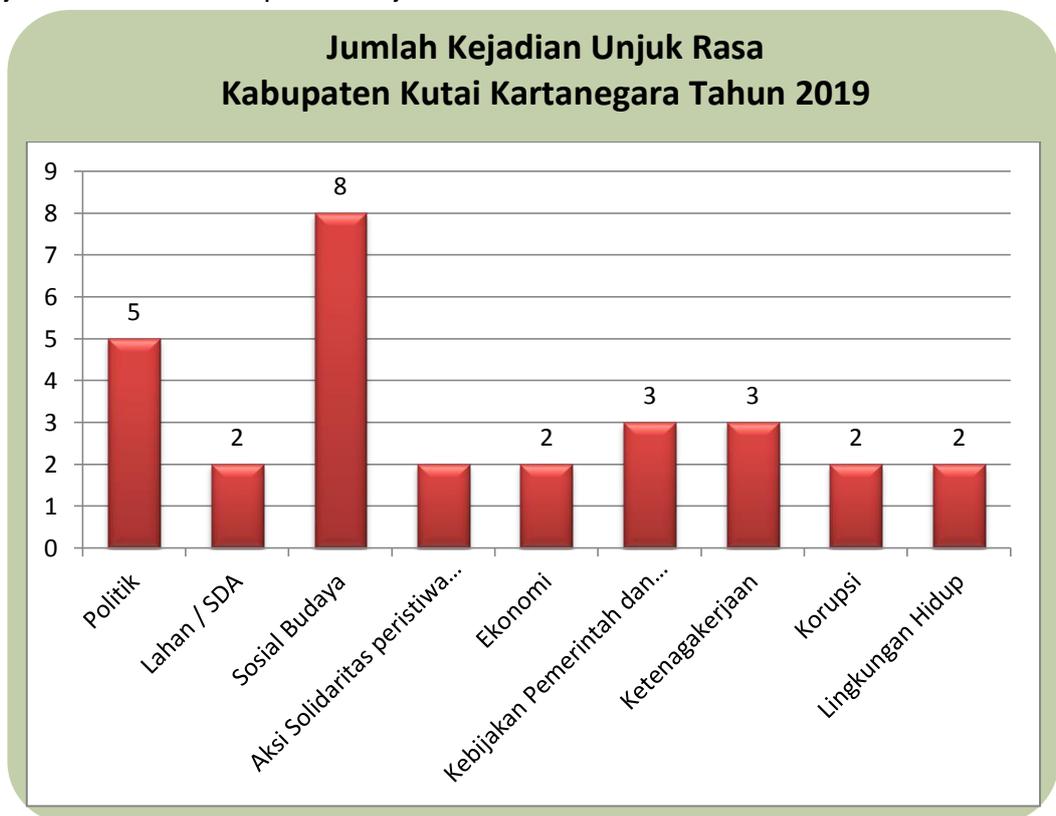


RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

pemutusan hubungan kerja (PHK) sedikit banyak menjadi beban sosial bagi daerah yang bisa berakibat meningkatnya angka kriminalitas ataupun penyakit masyarakat lainnya.

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2019 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 44 kali aksi, sedangkan pada tahun 2019 aksi unjukrasa sebanyak 29 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Sosial dan Budaya, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalangan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2019.





RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

| No | Latar Belakang Unjuk Rasa | Bulan (kali) | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|-------------------|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Politik | | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | 5 |
| 2 | Lahan / SDA | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 3 | Sosial Budaya | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 5 | Ekonomi | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 6 | Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 7 | Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 8 | Korupsi | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 9 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| Jumlah Unjuk Rasa | | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 29 |

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

| No | Pelaku Unjuk Rasa | Bulan (kali) | | | | | | | | | | | | Jumlah | |
|--------------------------|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | | |
| 1 | Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa) | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 9 |
| 2 | Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masyarakat) | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| 3 | Ormas / LSM | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Elemen Masyarakat | | 1 | 5 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 9 | |
| 5 | Karyawan / Sarikat Pekerja | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 6 | Organisasi Profesi | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pelaku Unjuk Rasa | | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 29 | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2019.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

| No | Jenis Sengketa | Bulan | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|-------------------------------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2 | Sengketa Pekerja dan Pengusaha | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| 3 | Pemogokan Kerja | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 4 | Penyelesaian Sengketa Buruh | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Sengketa Hubungan Industrial | | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 |

Data diatas menunjukkan konflik yang mengarah kepada unsur SARA, permasalahan mendasar adalah kurangnya pemahaman tentang perbedaan yang tidak perlu disikapi dengan kekerasan, dari keseluruhan hal tersebut Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya agar tidak meluas dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan agar situasi dan kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sampai akhir tahun 2019 upaya tersebut telah berhasil untuk menyelesaikan kasus-kasus diatas dan tidak terjadi bentrokan, adapun upaya tersebut sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial yang anggota terdiri dari Lintas SKPD baik vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2014 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

2. Memanfaatkan organisasi yang telah dibentuk di Kecamatan dan Desa/Kelurahan seperti FKDM, FKUB dan FPK sebagai wadah deteksi dini konflik yang akan berkembang.
3. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini di tiap Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Kabupaten untuk melaksanakan pemantauan deteksi dini
4. Memfasilitasi pihak yang berkonflik dalam suatu musyawarah untuk menemukan solusi terbaik agar tidak terjadi bentrokan
5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Dari upaya tersebut diatas, sehingga seluruh kejadian, konflik dan kasus tersebut diatas dapat terselesaikan sehingga kondisi tetap kondusif sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi leading sector dalam penanganan konflik sosial telah membentuk Tim terpadu yang melibatkan instansi vertikal didaerah (Polres, Kodim, Kejari, Kantor Kemenag, Kantor BPN/ATR, Pengadilan Negeri) dan OPD/SKPD terkaitserta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas didaerah, dengan dibentuknya :

A. Sinergitas antar Institusi Pemerintah :

1. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
2. Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
3. Tim Pengawasan Orang Asing (PORA).



B. Peningkatan Peran Masyarakat, dibentuk :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
4. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Kominda sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuran realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana fungsi dan peran kominda dapat mendeteksi secara dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan oleh kominda adalah Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2019 :



Isu Strategis dan Permasalahan Aktual berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini

| Bidang | Isu Strategis | Lokasi | Keterangan |
|-----------------|--|--|--|
| Ideologi | 1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i | Tenggarong | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengikut ± 70-80 orang Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah. |
| | 2. Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin" | Jahab, Tenggarong | Jumlah pengikut ± 20-50 orang |
| | 3. Keberadaan Faham Aliran Syiah | Tenggarong | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengikut ± 40-100 orang Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi. |
| Politik | 1. Tuntutan Pemekaran Daerah Otonomi Baru | <ul style="list-style-type: none"> Samboja Muara Jawa Sanga sanga | Perjuangan pembentukan Kabupaten Kutai |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|--|---|--|--|
| | (DOB) Kutai Pesisir | <ul style="list-style-type: none"> • Anggana • Loa Janan | <p>Pesisir kembali dihembuskan, dan mendapat dukungan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.</p> <p>Ini terbukti dengan dilaksanakannya pengukuhan Lembaga Adat Muara Jawa oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan aspirasi yang ingin diperjuangkan adalah melanjutkan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir.</p> |
| | 2. Keinginan kelompok masyarakat untuk bergabung dengan Rencana pembentukan Kabupaten Samarinda | <p>Kecamatan yang beasal dari Kab. Kukar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muara Jawa • Sangasanga <p>Kecamatan yang beasal dari Kota Samarinda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loa Janan Ilir • Samarinda Seberang • Palaran | <p>Telah terbentuknya Relawan Tim Perintis Kecamatan Muara Jawa dan Sangasanga menuju Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Samarinda</p> |
| | 3. Keinginan kelompok masyarakat untuk bergabung dengan Rencana pembentukan (DOB) Kabupaten Kutai Tengah | <ul style="list-style-type: none"> • Kota Bangun • Kembang Janggut • Muara Muntai • Muara Wis • Kenohan | <p>Pemetaan Potensi Masalah Pengusulan DOB (Daerah Otonomi Baru) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>a. Adanya rencana/aspirasi pembentukan Kab. Kutai Pesisir yang meliputi Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana,</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| | | | Sangasanga, Loa Janan b. Adanya rencana/aspirasi pembentukan Kab. Kutai Pesisir yang meliputi Kec. Kota Bangun, Tabang, Kembang Janggut, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan. |
| Ekonomi | 1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi. | Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara | <ul style="list-style-type: none"> • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK |
| | 2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA | • Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit | |
| Sosial Budaya | Ormas berlatar belakang Kedaerahan | 18 Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik • Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain • Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan |
| | Aksi Unjukrasa Karyawan dan Mahasiswa serta Kontraktor Lokal | • Tenggarong • Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit | |
| Hankam | Penyebaran faham radikal dan terorisme | Kecamatan di daerah Pesisir | • Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 |



| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011• Simpatisan kelompok radikal kanan |
| | | enggarong, Loa Duri dan Loa Janan | <ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) narapidana teroris yang akan berakhir masa pidananya dan akan kembali kepada masyarakat, sehingga perlun pengawasan dari pihak terkait. |

Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2019 :



Rekapitulasi Data Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

| No | Penanganan Konflik Sosial | Bulan | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak) | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 14 |
| 2 | Penanganan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 3 | Penanganan Program Kaltim Zero Prostitusi | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Penanganan THL Kab. Kutai Kartanegara | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Penanganan Konflik Antar Umat Beragama | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| 6 | Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 7 | Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan - Melibatkan Ormas/LSM - Hanya Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | 4 |
| 9 | Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
| 10 | Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 11 | Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| 12 | penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | Pemantauan Napiter | 1 | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
| 14 | Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Penanganan yang mengarah pada konflik SARA | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | 4 |
| 16 | Rakor Penanganan Konflik | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pertambahan | | | | | | | | | | | | | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---|
| - Ketenaga Kerjaan | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jumlah Penanganan Konflik Sosial | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 38 | |

**Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019**

| No | Penanganan Aspirasi Politik | Bulan (kali) | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | Tuntutan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Sengketa Dualisme Pengurus Partai Politik dan Ormas | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jumlah Penanganan Aspirasi Politik | | 0 | 1 | 0 | 1 |

b. Indikator II : Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat

Untuk indikator ini berhubungan dengan indikator pertama sebagaimana dijelaskan diatas juga telah mencapai target 100%. Berikut penanganan gejolak masyarakat yang telah dilaksanakan :

Berdasarkan pantauan, Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara telah menginventarisir pemasalahan aktual pada tahun 2019, diantaranya tumpang tindih kepemilikan lahan, demonstrasi tenaga kerja, keinginan sekelompok masyarakat yang berkeinginan membentuk Daerah Otonomi Baru, dan pemasalahan lainnya sebagai berikut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Penanganan Kejadian konflik yang berlatarbelakang SARA pada tahun 2019

| NO | WAKTU KEJADIAN | PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN |
|----|--|---|--|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Rabu 21 Agustus 2019 pukul 09.45 wita Rapat/Mediasi berakhir Pukul 12.55 wita | Kelompok Khilafatul Muslimin dengan warga Jahab | <p>Bertempat diruang Rapat camat Tenggarong dilaksanakan mediasi antara warga Kelurahan Jahab dengan Kelompok Khilafatul Muslimin.</p> <p>Hadir dalam kegiatan mediasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua MUI Kabupaten Kutai Kartanegara. H. Aminuddin Edy. Camat Tenggarong. Arfa Boma Pratama, AP. Kabid Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. Zulkipli, M. Si. Kapolsek Tenggarong. Iptu. Triyadi, SH. Rini Sulistyowati, SP. M. Si. Kasubbid Pembauran dan Kewarganegaraan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Lurah Jahab. Asnawi, S. Pd. M. Pd. Kemenag Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudarto. M. Hafiz. Sekretaris Lurah Kelurahan Jahab. Hamtolius (Kepala Adat Besar Dayak Tunjung Benuaq Kabupaten Kutai Kartanegara). Noh Ingan (Perwakilan PDKT Kabupaten Kutai Kartanegara). Daud Sema (tokoh masyarakat Jahab). Asnan (Ketua Karang Taruna Kelurahan Jahab). Bahri (Ketua STB Sempekak Tunjung Benuaq Kelurahan Jahab). Serka. Eko Tamono (Babinsa Kelurahan Jahab). M. Hidayatullah (warga Jahab). Norsam (Ketua RT 12). Amiruddin (Amir wilayah khilafatul Muslimin Borneo). Karimuddin (ketua PBLP). Muhammad Iqbal (Roisul Maskun). Nurkhamid (Ummul Quro). Kusnadi (Kemasulan Ummah Tenggarong). Sabaruddin (Khilafatul Muslimin). Rusdi (Khilafatul Muslimin). Rasuli (Khilafatul Muslimin). Warga Kelurahan Jahab ±15 Orang | <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam mediasi warga Kelurahan Jahab meminta agar pembangunan di hentikan sebelum terbitnya ijin sesuai prosedur. Meminta agar mengikuti aturan adat istiadat seperti yang sudah berjalan di lingkungan wilayah Jahab seperti pelanggaran atau sejenisnya yang berupa piring putih (bayar denda) pada pokok permasalahan yang di perbuat. Akan ada pertemuan secara kekeluargaan di kedua pihak antara pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong dan Adat dayak Kelurahan Jahab. Pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah Kelurahan Jahab tersebut di dirikan tidak ada perijinan kepada pemerintah setempat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Sabtu 26 Oktober 2019 Pukul 10.00 wita | Penganut Faham Syiah | Bertempat di Yayasan Abu Dzar Al Ghifari Kutai Kartanegara Jl. AM. Sangaji RT 1 nomor 4 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong telah dilaksanakan kegiatan 40 hari Haul Imam Husain AS, (Cucunda Rasulullah SAW) Tahun 2019 dan Haul Nabi | <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Melakukan koordinasi dengan dengan aparat intelijen dan keamanan untuk melaksanakan pengamanan selama kegiatan.</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | <p>Muhammad SAW oleh penganut paham syiah. penanggung jawab kegiatan Sdr. Andry Lioko Prasetyo, SE. Dengan di hadiri ± 300 orang jamaah yang berada dari PPU, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Balikpapan dan Kutai Kartanegara.</p> <p>Hadir dalam kegiatan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Habib Muhammad Riza assegaf. 2. Sayyid Thoriq Assegaff (Pembina Yayasan Abu Dzar al-ghifari kutai kartanegara) 3. M. Husni Fahrudin Ayub Sekjend LKK (Laskar kebangkitan Kutai) 4. Haidir (ketua Yayasan Abu Dzar al-ghifari kutai kartanegara) 5. M. Fauzi ketua Ahlul Bait Kutai Kartanegara (sekretaris Yayasan Abu Dzar A I-Ghifari kutai kartanegara) 6. Ketua panitia Pelaksana kegiatan Andri Lioko Prasetyo. 7. Ust Ali Khirid, MA. <p>Adapun susunan acara peringatan 40 haul Imam Husein 2019 dan haul Rasulullah SAW sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Gema Wahyu ilahi yang dibacakan oleh Fajrin Noor. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan Ketua Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari kutai kartanegara oleh Sayyid Thoriq Assegaf. 5. Syair - syair Husaini yang dibawakan oleh siswa Diniyah Pimpinan Cabang MAI Kutai Kartanegara dan Sayyid Jawad Baraqbah. 6. Hikmah memperingati 40 Hari Haul Imam Husein As dan haul Rasulullah SAW. 7. Syair - syair yang dibawakan oleh siswa Diniyah Pimpinan Cabang MAI Kutai Kartanegara dan Sayyid Jawad Baraqbah. 8. Maktal Imam Husain dan Rasulullah SAW oleh Ust. Sayid Muhammad Riza Assegaf dari Ponpes Al Hadi Pekalongan Jawa Tengah. 9. Bacaan doa ziarah Imam Husein. <p>Dalam kegiatan tersebut diisi tausiyah dengan penceramah Ustadz Sayid Ali Khirid (Samarinda) dan Ustadz Sayid Muhammad Riza Assegaff pimpinan Ponpes Al Hadi Pekalongan Jawa Tengah.</p> | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Selasa • 29 Oktober 2019 | <p>Detasemen Remaong Kuetai Paslit Kesultanan Kuetai Kartanegara Ing Martadipura</p> <p>Korlap Sdr. Hebby Nurkalam yang diikuti oleh ±</p> | <p>Detasemen Remaong Kuetai Paslit Kesultanan Kuetai Kartanegara Ing Martadipura melakukan aksi damai dengan Korlap Sdr. Hebby Nurkalam yang diikuti oleh ± 500 orang massa karena merasa tersinggung dengan adanya Perkataan Sdr. Wahono (LPM Maluhu, warga RT. 20 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong) yang mengatakan "Orang Kutai ingin</p> | <p>Tuntutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terima dengan perkataan Sdr. Wahono (LPM Desa Maluhu) yang dianggap telah merendahkan martabat Kesultanan dengan memfitnah Bahwa "Pangeran Poeger telah melakukan tindakan |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|
| | | 500 orang massa | <p>menguasai Tanah di Kalimantan Timur"</p> <p>massa juga membentangkan spanduk yang bertuliskan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kutai Rakyat, Kutai Kuat, Kutai Bangkit, Kutai Berjaya. Tidak Melihat Hal Yang Bukan Hak, Tidak Mendengar Hal Yang Bukan Hak. Tiada Maju Dalam Kesalahan, Tiada Mundur Dalam Kebenaran. 2. Kami Tidak Terima Statment Fitnah Yang Dilakukan Oleh Oknum Lpm Desa Maluhu Yang Menyatakan Bahwa Ayahanda Kami Pangeran Poeger Akan Mengklaim Seluruh Tanah Yang Ada Di Desa Maluhu Kabupaten Kutai Kartanegara, Ini Menyangkut Marwah Kami Sebagai Masyarakat Adat Kutai Secara Menyeluruh, Kami Menuntut Pemerintah Terkait Yang Ada Di Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Menindak Lanjuti Tentang Permasalahan Ini, Agar Tidak Meluas Sehingga Menimbulkan Sara. 3. Markas Besar Detasemen Remaong (Pasukan Elit Kesultanan Koetai Kartanegara Ing Martadipura). <p>Pengunjukrasa melukakan aksi di 3 tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Camat Tenggarong ditemui Camat Tenggarong Arfan Boma, S. Sos. M. Si. 2. Kantor Bupati Kutai Kartanegara ditemui Drs. H. Sunggono, MM (Sekretaris Daerah). 3. Kantor DPRD Kutai Kartanegara ditemui Supriyadi (Anggota Komisi I DPRD Kukar). | <p>premanisme" yang dimana sebenarnya tidak pernah ada tindakan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menuntut agar oknum LPM Desa Maluhu An. Sdr. Wahono dipulangkan ke daerah asalnya karena dikhawatirkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. <p>Langkah penanganan : Melakukan koordinasi dan langkah pengamanan selama aksi unjukrasa.</p> |
|--|--|-----------------|---|---|

Penanganan/Mediasi konflik yang berlatar belakang Ekonomi pada tahun 2019

| NO | WAKTU KEJADIAN | PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN |
|----|---|---|--|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Senin • 11 Februari 2019 • pukul 09.11 wita | Warga Desa Perdana dengan PT Rea Kaltim Plantations | <p>Sebanyak 50 Warga Desa Perdana Kecamatan Kembang Janggut yang dipimpin Sdr. Husni (Korlap) melakukan aksi unjukrasa PT. Rea Kaltim Plantations Central Perdana.</p> <p>Dengan mengendarai roda 2 sebanyak 9 unit dan roda 4 sebanyak 6 unit warga menyampaikan tuntutan Pembangunan</p> | <p>Tuntutan :</p> <p>Agar PT. Rea Kaltim Plantations Central Perdana merealisasikan perkebunan kelapa sawit Plasma untuk masyarakat Desa Perdana.</p> <p>Langkah Penanganan : WaKapolsek Kembang</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | | <p>Kebun Plasma Kelapa Sawit untuk masyarakat Desa Perdana.</p> <p>Setelah negoisasi antara pihak keamanan dan manajemen PT. Rea Kaltim Plantations Central Perdana, pada pukul 10.10 wita pengunjukrasa diterima pihak manajemen untuk menyampaikan aspirasinya.</p> <p>Mediasi dilaksanakan di Ruang Meeting PT. Rea Kaltim Plantations Central Perdana yang dihadiri oleh Iptu Ardiansyah (Waka Polsek Kembang Janggut), Aiptu Nasrianto (Kanit Reskrim) Aiptu Tohar Molyo Atim (Kanit Binmas), Briptu Piter Hero (Bhabinkamtibmas Desa Perdana), Nurhadi (Kades Perdana), Serma Sugianto (Bhabinsa Koramil 0906-12/Kbj), Husni Korlap Rembuk Kampung Desa Perdana, Sukri Manajemen Kebun Plasma PT. Rea Kaltim, Emanuel Taro Seco PT. Rea Kaltim, Ali Tokoh Adat Desa Perdana.</p> <p>Dalam Pertemuan tersebut, masyarakat warga menyampaikan ke manajemen PT. Rea Kaltim meminta segera di laksanakan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit Masyarakat Desa Perdana.</p> | <p>Janggut Iptu Ardiansyah bersama Babinsa Koramil 0906-12/KBJ dan Personil Polsek Kembang Janggut melakukan pengamanan dan negosiasi pengunjukrasa untuk mendorong mediasi.</p> <p>Kesimpulan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Desa Perdana menuntut agar PT. REA Kaltim Plantations Central Perdana untuk merealisasikan Perkebunan Plasma untuk warga desa Perdana sebagai peraturan yang ada. 2. Agar permasalahan tersebut di lakukan mediasi dengan mengundang instansi terkait yang di fasilitasi PT. Rea Kaltim. Agar sama - sama menjaga keamanan dan kondusif. |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Rabu • 25 September 2019 • Pukul 09.00 wita • Berakhir pukul 10.00 wita | <p>Warga Dusun V Batu Hitam Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan</p> | <p>Bertempat diruang Rapat Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan Pertemuan Mediasi Penyelesaian konflik perusahaan dengan warga terkait Dampak Lingkungan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Bukit Baiduri Energi dengan Warga Dusun V Batu Hitam Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan. 2. PT. Kalimantan Powerindo dengan Warga RT. 12 Dusun Jambe Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu. <p>Hadir dalam kegiatan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Muhamad Iriyanto (Sekban BLHK) b. Nana Sutisna (Kasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan) c. Riduan (Kasi Penegakan Hukum Lingkungan) d. Adhie Kusmiran (Bagian Pemerintahan Sektkab) e. Madransyah (Forum Pemerhati Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara) f. Melianus. L (Ketua RT. 15 Merandai Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan) g. Uweh (Ketua RT. 12 Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu) h. Kegiatan dihadiri ± 26 Warga <p>Pertemuan merupakan tindak lanjut dari surat Forum Pemerhati Lingkungan Hidup Nomor : 05/PU/FPLH/IX/2019 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa/demonstrasi tanggal 18 september 2019.</p> <p>Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara telah</p> | <p>kronologis terkait penyelesaian Dugaan Dampak Lingkungan PT. Bukit Baiduri Energi dengan warga Dusun V Batu Hitam Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan dan penyelesaian Dugaan Dampak Lingkungan PT. Kalimantan Powerindo dengan warga RT. 12 Dusun Jambe Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu.rasa/demonstrasi tanggal 18 september 2019.</p> <p>Hasil pertemuan : Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara akan melimpahkan penyelesaian Dugaan Dampak Lingkungan PT. Bukit Baiduri Energi dengan warga Dusun V Batu Hitam Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan dan penyelesaian Dugaan Dampak Lingkungan PT. Kalimantan Powerindo dengan warga RT. 12 Dusun Jambe Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu kepada Tim Penyelesaian masalah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Sejauh ini belum ada titik temu antar kedua belah pihak yang</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | menyampaikan | difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara karena pihak perwakilan PT. Baiduri Bukit Energi dan PT. Kalimantan Powerindo tidak dihadirkan serta dalam rapat hari ini |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Jum'at • 27 September 2019 • pukul 10.00 wita • berakhir pukul 11.45 wita | <ul style="list-style-type: none"> • massa dari elemen masyarakat 9 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya Desa Muara Kaman Ulu, Desa Separi, Muara Badak Ulu, Desa Sanggulan, Desa Loa Duri Ilir, Desa Sungai Meriam, Desa Tenggarong seberang, Desa Loa Kulu, Desa Handil Terusan • Laskar Merah Putih Kutai Kartanegara | <p>Aksi Unjuk Rasa Koalisi Rakyat Kukar Menggugat yang dipimpin Arie Yannur sebagai koordinator lapangan (Korlap), massa dari elemen masyarakat 9 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya Desa Muara Kaman Ulu, Desa Separi, Muara Badak Ulu, Desa Sanggulan, Desa Loa Duri Ilir, Desa Sungai Meriam, Desa Tenggarong seberang, Desa Loa Kulu, Desa Handil Terusan, serta Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Kutai Kartanegara, berjumlah ± 50 orang.</p> <p>Aksi dilakukan karena beberapa calon Kepala Desa merasa dirugikan dan dinyatakan gagal dikarenakan adanya Peraturan Bupati (Perbub) Kutai Kartanegara Nomor 10 dan 36 terkait aturan tambahan dalam tata cara penjarangan dan penetapan calon Kepala Desa pada Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kabupaten.</p> <p>Massa aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koalisi Rakyat Kukar Menggugat Cabut Perbub Kukar Nomor 10 dan 36 Tahun 2019 Pasal 83 Ayat 2 yang telah mencederai hak - hak Warga Negara. b. Rakyat Kukar Menggugat, Tunda Pemilihan Serentak di Kukar Karena Cacat Hukum dan Cacat Prosedural. <p>Massa aksi diterima oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid, SE. M. Si, Supriadi, S. PdI. M. Pd. (Anggota DPRD), Didik Eko Wahono (Anggota DPRD), Firmadi Iksan (Anggota DPRD), Safruddin Pabonglean (Anggota DPRD), Ridha Darmawan (Sekretaris Dewan DPRD).</p> | <p>Tuntutan : Meminta Pembatalan Perbub Kukar No 10 dan 36 tahun 2019 terkait aturan tambahan dalam tata cara penjarangan dan penetapan calon kepala desa pada Pilkadaes Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena dinilai merugikan beberapa Calon Kades yang mengikuti penjarangan.</p> <p>Aksi dilakukan untuk menindaklanjuti adanya kontroversi beberapa Pasal dalam Perbub Kutai Kartanegara Nomor 10 dan 36 tahun 2019. Terkait aturan tambahan dalam tata cara penjarangan dan penetapan Calon pada Pilkadaes Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diduga dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, serta Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.</p> <p>Tanggapan Abdul Rasid, SE. M. Si (Ketua DPRD Kutai Kartanegara, menyampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa aspirasi yang di suarakan massa aksi, merupakan tanggung jawab Kami DPRD Kutai Kartanegara dan akan kami sampaikan ke Pemerintah Daerah karena Perbub ranahnya Bupati. b. Apabila setelah disampaikan ke Bupati, namun hasilnya tidak sesuai, akan kita kembalikan kepada aturan yang mendukung aspirasi dan kepentingan kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara kedepannya. c. Pentingnya untuk |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | diketahui karena setiap Pemerintah Desa nantinya akan defenitif bukan Kepala Desa yang bersifat sementara |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sabtu 21 Desember 2019, | <ul style="list-style-type: none"> • Pihak PT. Jasa Marga (JMTO) dengan • LPM Kelurahan Sungai Merdeka • Ormas LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur) • Ormas Gepak Kuning • Ormas Gepak Hijau. | <p>Memediasi pertemuan antara Pihak PT. Jasa Marga (JMTO) dengan Ormas, LPM Dan RT Se - Kelurahan Sungai Merdeka yang diikuti oleh ± 70 orang di Kantor Kelurahan Sungai Merdeka Jl. Soekarno - Hatta KM. 38 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antonius K Pakalla, SH. (Kasi Trantib Kecamatan Samboja). 2. Drs. Agus Santosa. (Lurah Sungai Merdeka). 3. Roni (Manager PT. JMTO). 4. Watari Wahid (Maintenance PT. JMTO). 5. Aiptu. Pol. Edy. (Bagian Perekrutan Security Polda Kaltim). 6. Ipda. Pol. Iwan (Kasub Sektor Kuala Samboja). 7. Serma. Menar. (Babinsa Sungai Merdeka). 8. Briptu. Pol. Wisnu. (Bhabinkamtibmas Sungai Merdeka). 9. Rini (Ketua LPM Kelurahan Sungai Merdeka). 10. Perwakilan Ormas LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur) Kecamatan Samboja. 11. Heri (Penasehat Ormas Gepak Kuning). 12. Para Ketua RT Se - Kelurahan Sungai Merdeka. 13. Perwakilan Ormas Gepak Hijau.. | <p>Hasil kesepakatan dari pertemuan/mediasi tersebut yaitu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pihak sepakat dengan syarat dan ketentuan dalam proses penerimaan tenaga kerja di PT. JMTO. 2. Kedepannya untuk lamaran tenaga kerja di PT. JMTO melalui pihak Kelurahan Sungai Merdeka. 3. PT. JMTO agar membuat daftar lowongan pekerjaan yang dibutuhkan yang kemudian disampaikan/ diinformasikan ke pihak Kelurahan Sungai Merdeka agar dapat disosialisasikan ke masyarakat sekitar. <p>Langkah penanganan : Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk monitoring dan pengamanan jalannya dan pasca mediasi.</p> |

Penanganan/Mediasi konflik Sosial yang berlatarbelakang Politik (Pembentukan DOB) pada tahun 2019

| NO | WAKTU KEJADIAN | PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN |
|----|--|---|---|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Rabu • 20 Februari 2019 • pukul 11.25 Wita | Tim Sukses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Tengah | Bertempat di Ruang Rapat Gedung D, lantai 6 (enam) DPRD Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan rapat dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim Sukses Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Tengah dengan agenda membahas tentang usulan Pembentukan Kabupaten Kutai Tengah. Rapat di pimpin oleh Zain Taufiqrohman (Ketua Komisi I DPRD | Tuntutan : warga masyarakat Kecamatan Tabang, Ma.Muntai, Kenohan, Ma.Wis, Kembang Janggut dan Kota Namgun mendambakan Daerah Otonomi Daerah Baru (DOB) Kutai Tengah. |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>Provinsi Kalimantan Timur Fraksi PAN) yang di hadiri ± 50 Orang.</p> <p>Hadir dalam rapat sebgai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Yacob Manika (Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai PDIP). 2. Jahidin (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai PKB). 3. Rita Artaty Barito, SH. (Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar). 4. Fauziah Umar (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra). 5. M. Yahya Alatas Ubai (Caleg DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Dapil 6 dari Partai Gerindra). 6. Aming Aing (Tim Sukses Kutai Tengah). 7. Dr. Tamrin (Tim Sukses Kutai Tengah) 8. Supar Ibat (Pemuda dari Kecamatan Tabang). | <p>Kesimpulan dari rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim sukses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Tengah menyampaikan keinginan untuk membentuk Kabupaten Kutai Tengah dan mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timu.r b. Secara Prinsip Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Tengah dengan syarat mengikuti kaidah - kaidah, aturan - aturan ataupun prosedur pengusulan dan sampai terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Tengah. c. Komisi I DPRD Provinsi Kaltim akan membuat kajian - kajian dan hasilnya akan disampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan pertimbangan /masukan terkait usulan Tim Sukses Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Tengah. |
|--|--|--|---|---|

Aksi Unjuk Rasa Berlatar belakang Sosial Budaya pada tahun 2019

| NO | WAKTU KEJADIAN | PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN |
|----|---|---|---|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Senin • 4 Maret 2019 <p>Pukul 09.00 wita</p> | <p>Masyarakat Pemerhati Perkembangan Kaltim (MPPKT)</p> <p>Koordinator : Sultan</p> <p>aksi unjuk rasa ± 30 orang</p> | <p>Bertempat didepan Kantor Gubernur Kaltim Sebanyak ± 30 orang melakukan Aksi Unjuk Rasa yang tergabung dalam Masyarakat Pemerhati Perkembangan Kaltim (MPPK) di depan Kantor Gubernur Kaltim terkait tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU).</p> <p>Pengunjukrasa membentangkan spanduk yang bertuliskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pencemaran lingkungan PT. Multi Harapan Utama (MHU), Ketua RT 17 beserta warganya mohon Yth Bapak Presiden Jokowi Lindungi Kami dari kematian racun batubara dan keterpurukan ekonomi. - Kehadiran PT MHU di Rt 17 berhalal, Bukannya Kesejahteraan dan | <p>Tuntutan :</p> <p>Warga Rt. 17 Loa Kulu melalui MPPKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Bupati Kutai Kartanegara, Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Lingkungan Hidup segera menutup aktifitas PT. MHU di wilayah RT.17 Desa Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu 2. Membebaskan rumah warga dengan radius 500 meter dari stop file /conveyor PT MHU 3. Agar PT MHU melakukan medical check up warga RT 17 di RSU Pemerintah Kukar |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | <p>lowongan kerja, yang kami dapatkan justru penyakit, ancaman kematian dari debu batubara dan keterpurukan ekonomi yang kami dapatkan.</p> <p>Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan arahan :</p> <p>a. Lengkapi data, kronologi, sejarah pemanfaatan/ perolehan lahan, luasan area dampak dan sejarah perolehan lahan yang terkena dampak aktifitas PT. MHU.</p> <p>b. Uang kompensasi debu akan difasilitasi, harap bersabar karena semakin lama tidak dibayar maka semakin besar dana yang diperoleh.</p> <p>c. Persoalan Medical Check Up hal mudah, bisa dilakukan dilokasi.</p> <p>d. CSR sudah dikendalikan oleh Bupati Kutai Kartanegara silahkan diawasi.</p> <p>e. Tuntutan penutup PT. MHU bisa dilakukan jika masalahnya jelas, jika tidak ada dasarnya maka Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut.</p> <p>f. Jika ada RT lain, maka harus konsolidasikan dahulu dengan RT lain yang terdampak, jangan satu RT muncul, nanti muncul lagi RT lain yang meminta penyelesaian masalah yang sama.</p> | <p>4. PT. MHU mengumumkan isi proposal dokumen Amdal, RKL, RPL dan Penyaluran CSR, sesuai UU No 23 tahun 2009 Jo PP No 4 Tahun 2012 Dll.</p> <p>Langkah Penanganan : Pada pukul 09.20 wita, 13 orang perwakilan massa diterima di Ruang Rapat Tuah Himbau, Lantai 6 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh Yanti (Plt. Karo PPOD Pemrov. Kaltim), Mukri (Biro PPOD), Ahmad Fais (DLH Prov. Kaltim), Azuar (Distamben Prov. Kaltim) dan H. Musi (Satpol PP Prov. Kaltim).</p> <p>Kemudian pada pukul 10.40 wita pertemuan dipindahkan ke Ruang Rapat Tepian 2, Lantai 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri oleh Isran Noor (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) dan Samsir (Perwakilan PT. MHU).</p> |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Jumat 8 Maret 2019 | Warga L2 Tenggarong Seberang | <p>Warga L2 Kecamatan Tenggarong Seberang melakukan aksi penanaman pohon pisang ditengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena jalan disekitar tempat tinggal mereka rusak. Tanaman pisang tersebut terdapat tulisan "Anda Memasuki Wisata Pisang"</p> <p>Rusaknya jalan ini disebabkan banyaknya aktivitas hauling dari perusahaan batubara (tambang liar) yang menjadi salah satu penyebabnya serta banyaknya kendaraan alat berat yang melebihi tonase.</p> <p>Warga telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah kecamatan Tenggarong Seberang, dan Camat Tenggarong Seberang telah bersurat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengalokasikan dana perbaikan jalan tersebut. Namun hingga tahun 2019 belum ada progres perbaikan jalan tersebut. Untuk diketahui bahwa jalur jalan poros L1, L2 hingga L3 adalah jalan provinsi.</p> | <p>Tuntutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta perhatian pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memperbaiki jalan poros Tenggarong Seberang – Sebulu. 2. Meminta ketegasan pemerintah untuk mengatur dan memberikan sanksi secara kepada mobil yang melebihi tonase jalan. <p>Langkah Penanganan : Mengumpulkan informasi dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan</p> |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Selasa 9 April 2019 • pukul 10.00 wita | <p>Gabungan Mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MII Kab Kutai Kartanegara 2. KAMII Kab Kutai Kartanegara | <p>Aksi damai mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara yang merupakan gabungan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Unikarta. 2. PMII Kab Kutai Kartanegara 3. KAMII Kab Kutai Kartanegara | <p>Tuntutan : menuntut netralnya aparat hukum TNI, POLRI dan Aparatur Pemerintah dalam Pemilu 2019.</p> <p>Langkah Penanganan : 1. Aparat keamanan (Polres</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | <p>3.HMI Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>4.Aliansi pemuda Damai Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Korlap aksi demo Akhmad Rifai.</p> | <p>4. HMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Korlap aksi demo Akhmad Rifai. Aksi damai mahasiswa menyoroti netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pemilu 2019.</p> <p>Peserta aksi unjukrasa melakukan konvoi dari bundaran jembatan bongkok menuju kantor Bupati Kutai Kartanegara.</p> <p>Pada AUR tersebut terjadi kejadian pengeroyokan preman terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjukrasa. Dengan kronologis Pukul 10.00 wita mahasiswa tiba di depan halaman kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan aksi memberhentikan kendaraan R2 & R4, selanjutnya beberapa oknum preman mengganggu aksi demo tersebut dengan melukai satu orang mahasiswa, selanjutnya oknum tersebut diamankan oleh Polisi dan anggota Satpol PP kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Didepan Kantor Bupati Kutai Kartanegara peserta AUR diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H. Sunggono, MM, didampingi Kasatpol PP Kabupaten Kutai kartanegara H. Fida hurasani, S. Sos, .Kabid Trantibum M. Rida Patrianta SSTP, M.Si, Kasi P3 Nadi Baswan, S.IP, Kasi Ops Tri joko kuncoro, SE.</p> <p>Aksi bubar pada pukul 11.30 wita selanjuta para pengunjung rasa bergeser ke Polres Kukar situasi aman terkendali.</p> | <p>dan Satpol PP) melakukan pengamanan selama kegiatan AUR yang melaksanakan aksi di 3 (titik) yakni di bundaran jembatan bongkok, Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan di Mapolres Kutai Kartanegara.</p> <p>2. Kepolisian Polres Kukar telah mengamankan pelaku pengeroyokan terhadap peserta AUR untuk diproses secara hukum.</p> |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Sabtu • 13 april 2019 • Pukul 10.30 Wita • Kegiatan selesai pukul 11.00 wita | <p>Jatam (Jaringan Tambang)</p> | <p>Sejumlah warga Sanga-Sanga dan aktivis peduli lingkungan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Aksi Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang Pilpres 2019 yang berlangsung lokasi Areal Tambang CV. Sanga-Sanga Perkasa, RT 24 Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga.</p> <p>Deklarasi ini menuntut persoalan krisis keselamatan rakyat yang tidak selesai. Bahkan, eskalasinya justru cenderung meningkat setiap tahun. Seperti masalah 32 warga Kaltim yang tewas dilubang tambang dengan mayoritas anak-anak.</p> <p>Kegiatan aksi Deklarasi Rakyat Tolak Oligarki Tambang yang dipimpin oleh Sdr. Pradarma Rupang (Jatam Kaltim), Sdr. Akmal (Aktivis Kecamatan Muara Jawa) Sdr. M. Zaenuri (Ketua RT. 24 Kelurahan Sangasanga Dalam). Mahasiswa dan Jatam Kaltim yang berjumlah ± 50 orang.</p> <p>Adapun alat peraga yang digunakan dalam kegiatan tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentangan Bendera Merah Putih dengan ukuran 2 x 4 meter dengan di iringi menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Pembentangan baleho/spanduk dengan | <p>Tuntutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak oligarki Tambang yang menyengsarakan masyarakat. 2. Meminta agar ijin pertambangan CV. Sanga-Sanga Perkasa untuk segera dicabut, karena di khawatirkan kalau tidak dicabut nanti dialihkan kepada perusahaan lainnya. <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Pengamanan aksi tersebut dilakukan Kapolsek Sangasanga Iptu. H. M. Afnan. S. Sos. MM melakukan negosiasi kepada Sdr. Pradarma Rupang untuk segera menghentikan kegiatan tersebut karena tidak ada ijin dan pemberitahuan kepada pihak kepolisian setempat.</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | ukuran 10 X 20 meter bertuliskan "Apakah Penghancuran Alam Akan Usai Jika Kami Punya Presiden Terpilih". | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Minggu • 16 Juni 2019 | Gerakan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) Desa Santan Ulu Kec. Marang kayu | <p>Warga masyarakat desa Santan Ulu yang menamakan Gerakan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) mengadakan aksi damai di depan pintu masuk jalan perusahaan PT. Indominco Mandiri (IMM)-BANPU Group di desa Santan Ulu.</p> <p>Terjadinya banjir dimana-mana (Samarinda, Tenggarong, Marang Kayu Muara Badak dan Bontang) membuat keresahan warga dan menduga akibat pengupasan lahan perusahaan tambang batubara.</p> <p>Sehingga warga desa Santan Ulu melakukan aksi damai untuk meminta pemerintah untuk memastikan bahwa keberadaan perusahaan tambang batubara yang mengeksplorasi lahan yang menjadi penyebab banjir di beberapa desa di Marang Kayu.</p> <p>Aksi damai warga desa Santan Ulu yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) diikuti sekitar ± 30 orang dengan membentangkan spanduk dan tulisan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi damai Gabungan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB) Desa Santan. 2. BANPU GROUP bertanggungjawab atas banjir di Bontang, Marang Kayu dan sekitarnya. 3. Indominco Go-To- Hell. 4. Sungai Santan Bukan Toilet.. STOPP... buang limbah 5. Bebaskan Sungai Santan dari Limbah Tambang. | <p>Adapun beberapa TUNTUTAN dari aksi damai tersebut yaitu :</p> <p>I. Pihak IMM - BANPU Group HARUS menghentikan sementara aktifitas operasional penambangannya sementara ini sampai ada langkah-langkah konkret dari pihak Pihak IMM - BANPU Group melakukan koordinasi teknis dan survey lapangan bersama-sama Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur serta pendampingan dari Gerakan Masyarakat Peduli Banjir (GMPB).</p> <p>Hal ini harus dilakukan guna mendapatkan DATA VALID dan BUKTI NYATA terkait ADANYA ATAU TIDAK ADANYA korelasi musibah banjir di Kota Bontang dan Desa Santan</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kamis • 25 Juli 2019 • Pukul 10.50 - 11.50 wita | <ul style="list-style-type: none"> • Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur dengan jumlah massa ± 23 orang | <p>Aksi Unjukrasa Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur dengan jumlah massa ± 23 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pukul 10.00 wita, massa berkumpul di bawah jembatan Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pergeseran ke Kantor Kejari Kukar. Pada Pukul 10.30 wita massa menuju ke Kantor Kejari dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil milik pribadi. - Pukul 10.50 wita, massa tiba di kantor Kejari Kabupaten Kutai kartanegara dan melaksanakan orasi. <p>Adapun Korlap dalam aksi damai Ahmadi, SH. Agama: Islam, umur : 28 Tahun, Status: Mahasiswa Unikarta (Hp 082363539999).</p> <p>Dalam AUR tersebut mahasiswa membentangkan spanduk yang bertuliskan " Tuntut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek</p> | <p>Langkah Penangan :</p> <p>Pukul 11.25 wita, Korlap dan perwakilan aksi di terima oleh pihak Kejaksaan melalui Pasi Intel Teguh Dwicahyono SH.MH, dengan penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sedang melakukan Penyidikan Perkara Korupsi yaitu Tambak Sepatin Desa Kecamatan Anggana dengan kerugian Negara senilai 9,6 Milyar. 2. Bahwa dari hasil penyidikan tersebut telah memeriksa kurang lebih 30 orang saksi. 3. Bahwa dari pemeriksaan saksi tersebut telah menetapkan tersangka | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Peningkatan Irigasi Tambak Desa Sepatin Tahun 2014 "</p> <p>Tuntutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak perilaku korupsi akhir - akhir ini dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang merugikan Negara. 2. Menuntut penanganan perkara korupsi proyek peningkatan irigasi Tambak di Desa Sepatin Kec. Anggana dengan Pagu Anggaran 9,5 M melalui mekanisme lelang yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Akbar Persada di mana kawasan tersebut diduga masuk dalam kawasan hutan mangrove yang dilindungi. | <p>sebanyak 3 orang yaitu : PPTK kegiatan, dari pihak Kontraktor Pelaksana (PT. Akbar Persada), dan dari pihak swasta lainnya.</p> <p>4. Bahwa Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sedang menunggu hasil penghitungan kerugian Negara dari pihak BPK dan akan melakukan pelimpahan perkara tersebut Ke Pengadilan Tipikor Samarinda untuk dilakukan persidangan.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Selasa • 6 Agustus 2019 • Pukul 10.00 wita • AUR berakhir pada pukul 11.45 wita | <ul style="list-style-type: none"> • HMI • korlap Sdr. Gagas Darma – Mahasiswa Fak. Hukum Unikarta • peserta demo 30 orang | <p>Aksi Unjuk Rasa dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Kab. Kutai Kartanegara di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara (Pukul 10.00 Wita)</p> <p>Para pendemo ditemui oleh Anggota Dewan Andi Faisal Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar, menyampaikan bahwa untuk aturan pertambangan saat ini di tangani oleh Provinsi untuk menangani hal tersebut harus melalui Provinsi.</p> <p>Pada pukul 10.40 wita para pengunjung rasa bergeser Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan melanjutkan orasi kemudian pada pukul 11.15 wita para pengunjung rasa ditemui oleh Abdullah Panusu SH, Kabag. SDA Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyampaikan bahwa untuk penanganan reklamasi tambang adalah wewenang Kementerian ESDM Pusat karena segala urusan ijin saat ini dikeluarkan oleh pihak pusat dan tembusan ke Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak bisa mengambil kebijakan.</p> <p>Kemudian para pengunjung rasa meminta agar dapat dipertemukan dengan Bupati Kutai Kartanegara namun Bupati tidak ada di tempat kemudian para pendemo meminta kepada Kabag SDA Abdullah Panusu, SH agar menjadwalkan pertemuan dengan Bupati namun Kabag SDA Abdullah Panusu, SH tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat menentukan dan menjadwalkan kapan dapat bertemu Bupati.</p> | <p>Tuntutan :</p> <p>menuntut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bupati agar melaksanakan reklamasi eks tambang Tanito Harum sebanyak 69 titik yang masih belum di tutup dan direklamasi.</p> <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Mengkoordinasikan Pengamanan selama AUR dan mengkomunikasikan dengan pejabat berwenang untuk dapat menemui dan menerima aspirasi pengunjung rasa.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kamis • 19 September 2019 • 09.00 wita | <ul style="list-style-type: none"> • Komite Transparansi Pemerintah Daerah (KTPD) • Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI Kukar) • Laskar | <p>Aksi Unjukrasa Gabungan LSM dan Ormas yakni Komite Transparansi Pemerintah Daerah (KTPD), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI Kukar) dan Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) di Kantor Pekerjaan Umum (PUD) dengan Koorlap Demo Sdr. Robi Andriawan, SH (Hp.085211457973).</p> <p>Aksi tersebut disebut "Tutup Sungut" dengan ditandai para pengunjungrasa menggunakan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tangkap oknum ASN yang terlibat konspirasi proyek Kabupaten Kutai Kartanegara, - Aksi Tutup sungut minyak Dah Kami Ncarang <p>Adapun tuntutan antara lain :</p> | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | Kebangkitan Kutai (LKK) | <p>masker.</p> <p>Adapun Rangkaian kegiatan unjuk rasa sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada pukul 10.00 wita massa pengunjung rasa ± 200 orang dari gabungan Komite Transparansi Pemerintah Daerah (KTPD), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI Kukar), Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) tiba di depan Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentangkan spanduk sebanyak 3 buah. Pukul 10.20 wita, massa pengunjung rasa menuju Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pukul 10.30 wita, tiba di kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan langsung melaksanakan pembentangan spanduk dan Pukul 10.40 perwakilan AUR diterima H. Alif Turyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. <p>Pengunjukrasa membawa spanduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Gerakan Tutup Sungut" munya dah kami ncarang !! | <ol style="list-style-type: none"> Meminta supaya pelelangan proyek - proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan secara fair artinya tidak ada lagi pemenangan proyek tersebut yang ditentukan. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk membersihkan oknum - oknum ASN yang terlibat dalam konspirasi proyek. Meminta kepada Kajari Kutai Kartanegara maupun lembaga terkaitnya agar mengusut tuntas proyek - proyek konspirasi tersebut. Meminta kepada Bupati agar terlibat aktif dalam memperhatikan pelelangan proyek khususnya proyek - proyek pemerintahan supaya tidak terjadi konspirasi dalam pelelangan proyek tersebut. <p>Langkah penanganan : Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama kegiatan.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Selasa • 05 November 2019 • Pukul 10.00 wita | Detasemen Remaong Kesultanan Kutai Kartanegara | <p>Aksi damai dari Detasemen Remaong Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan koordinator aksi Sdr. Heby Nurlan Arafat. Massa ± 150 orang. Pengunjuk rasa menggunakan kendaraan roda empat (4) dan roda dua (2).</p> <p>Aksi unjukrasa tersebut dilakukan karena adanya pengakuan Sdr. Iansyahreza Fahlevi (Labok) warga Kecamatan Muara Kaman yang mengakui dirinya sebagai Raja/Maharaja Mulawarman sehingga masyarakat Kutai merasa dilecehkan dengan adanya pengakuan tersebut.</p> <p>Dalam aksi unjukrasa tersebut massa membawa alat peraga berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 buah Toa pengeras suara. - 1 buah Bendera Ormas Remaong Koetai. <p>Pukul 10.00 Wita Mapolres Kutai Kartanegara diterima Kabag Ops. Menyampaikan bahwa Polres akan mengawal aspirasi yang disampaikan dan akan mengkoordinasikan dengan Pemkab.</p> <p>Pukul 11.12 wita Di Kantor Bupati Kukar, terima oleh Drs. Edi Damansyah, M. Si.</p> | <p>Pukul 12.30 Wita Kantor DPRD Kutai Kartanegara, diterima dalam media, yg dihadiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> Supriadi (Ketua Komisi I). Sofyan (DPRD). Aji Dendi (DPRD). Faisal (Komisi III DPRD) Letkol. Asmawi (BINDA Kukar, Kubar, Mahulu). Sdr. Heby, Hassanudin, Encik Eko, Yus dkk (Keluarga Kesultanan Kutai). <p>Dalam pertemuan didepakatim bahwa DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dan akan berkoordinasi dengan Pemkab, kesultanan, dan pihak keamanan.</p> <p>Tuntutan : Detasemen Remaong Kutai dan masyarakat Kutai</p> | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk masalah Sdr. lansyahreza Fahlevi (Labok) kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menemui Sdr. lansyahreza Fahlevi (Labok) sebagai langkah awal. - Terkait masalah wahono kami akan menelusuri terkait langkah yang telah dilakukan. | <p>menolak adanya Kerajaan/Raja di bumi Kutai selain Kerajaan Kutai yang Sah yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dipimpin Sultan Aji Muhammad Arifin. Dimana saat ini ada pengakuan lansyahreza Fahlevi (Labok) sebagai Raja Kerajaan Kutai Mulawarman.</p> |
|--|--|--|---|

Penanganan Aksi Terorisme Tahun 2019

| NO | WAKTU KEJADIAN | PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU | URAIAN SINGKAT KEJADIAN | TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN |
|----|--|---|--|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Selasa • 26 Februari 2019 • Pukul 09.10 wita | Rudi Hardiyanto | <p>Proses bebas dan pemulangan sdr. Rudi Hardiyanto meninggalkan Lapas Kelas IIB Tenggarong menuju Bandara APT Pranoto Samarinda dengan pengawalan dari intel Polres Kukar, Binda Wilayah Kukar.</p> <p>Pada pukul 11.30 wita Rombongan pendamping dan sdr. Rudi Hardiyanto tiba di Bandara APT. Pranoto Kota Samarinda, kemudian menuju Ruang VIP Room Bandara APT. Pranoto Samarinda sambil menunggu jadwal keberangkatannya menuju Bandara Juanda Kota Surabaya.</p> <p>Pada pukul 12.00 wita Yuda Erlangga (Eco Racing) mendampingi Sdr. Ridho Pratama Putra (Mantan Napiter Bom Gereja Oekumene Samarinda), Sdr. Siti Nur Azizah (Istri Sdr. Ridho Pratama Putra) dan Sdr. Gisti Adam (mantan Napiter Bom Gereja Oekumene Samarinda) tiba di Bandara APT. Pranoto Samarinda untuk bertemu dan memberikan oleh - oleh berupa amplang dan sejumlah uang (tidak diketahui berapa jumlahnya) kepada Sdr. Rudi Hardiyanto sebagai bekal untuk dibawa ke kampung halanannya di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Batu Malang Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Pada pukul 14.10 wita Sdr. Rudi Hardiyanto bersama Awang Febrian S.Sos M.Si (Sekretaris Dinsos Kabupaten Kutai Kartanegara) take off dari Bandara APT. Pranoto Kota Samarinda menuju Bandara Juanda Kota Surabaya menggunakan Pesawan Lion Air JT 317.</p> | <p>Langkah Penanganan : Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dengan Pengelola Bandara APT Pranoto dan dan membuat surat peminjaman ruang tunggu VVIP kepada Pemprov Kalimantan Timur.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Minggu • 21 Juli 2019 • Pukul 09.00 wita | <ul style="list-style-type: none"> • Abdullah Hussen Bin Moch Saiful Anwar | <p>Pembebasan napiter atasnama Abdullah Hussen Bin Moch Saiful Anwar.</p> <p>Proses pembebasan dengan dilakukan proses penandatanganan administrasi yang</p> | <p>Langkah Penanganan : Seteleah kelengkapan administrasi selesai dilaksanakan dan sudah</p> |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>harus dipenuhi dan dilengkapi oleh napiter yang dipimpin oleh Kalapas Ibu Salis Farida Fitriani, Bc. I.P, S. Pd, MH bersama petugas lapas M. Asril Yasin A. Tahyas, A. Md. IP. SH (Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan Disiplin) dan Administrasi Lapas Anak. H. Adi Sukatno. SH.</p> <p>Adapun Identitas napiter yang akan bebas :</p> <p>Abdullah Hussien Bin Moch Saiful Anwar, laki-laki, Islam, belum kawin, Surabaya 25 Mei 2003, 16 Thn, SD, tidak bekerja, Alamat Perum PLN Ap2B Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Selatan Kodya Balikpapan Kalimantan Timur, Melanggar pasal 15 Jo 7 UU RI 15/2003 UU 15 Jo pasal 7 RI 15/2003 putusan 3/PID.SUS.ANAK/2019/PN.JKT.TIM tanggal putusan 21 Februari 2019 menjalani hukuman vonis 6 bulan.</p> <p>Berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Kelas II Samarinda Jl. Imam Bonjol No. 37 RT. 08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : W18.Eo.PK.01.03-624 Tanggal 11 Juli 2019 tentang pemberitahuan masa berakhirnya masa pidana anak binaan An. Abdullah Hussien Bin Moch Saiful Anwar. Mengacu Dasar Surat Petikan Pengadilan Jakarta Timur Nomor : 3/PID.SUS.ANAK/2019/PN.JKT.TIM Tanggal Putusan 21 Februari 2019 Tentang Putusan Masa Pidana Anak (menjalani hukuman vonis 6 bulan).</p> | <p>dinyatakan lengkap. selanjutnya napiter diserahkan oleh Kalapas Anak kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara diberangkatkan untuk diserahkan kepada keluarganya di Balikpapan dengan dikawal Polda kaltim dan anggota BIN.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Senin • 21 Oktober 2019 | Ridho Pratama Putra (mantan napiter) | <p>Diperoleh informasi bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2019 Sdr. Ridho Pratama Putra bersama istrinya Sdri. Siti Nur Azizah telah berpindah tempat dari rumah mertuanya yaitu Bpk. Ust. Juliansyah yang beralamat di Jl. Gerbang Dayaku (Poros Tenggarong - Samarinda) Gg. Nangka RT. 10 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu ke Rumah Kontrakannya di Jl. Pembangunan No. 16 RT. 05 KM. 5 (Poros Samarinda - Balikpapan) Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Alasan pindah, karena ingin mencari tempat tinggal yang strategis untuk membuka usaha, sampai saat ini masih kesulitan dalam mencari dan melamar pekerjaan di perusahaan - perusahaan karena statusnya yang sebagai Eks Napiter.</p> <p>Kegiatan sehari - hari dari Sdr. Ridho Pratama Putra sementara saat ini hanya tinggal di rumah kontrakannya menunggu waktu untuk pengurusan SKCK baru sambil</p> | <p>Bahwa selain itu, rencananya Sdr. Ridho Pratama Putra kedepan ingin membuka usaha seperti berjualan sembako, pulsa, minuman dingin dan lain - lain yang akan dikelola oleh istri dan dibantu oleh Ibu mertuanya. Sedangkan untuk Sdr. Ridho Pratama Putra sendiri setelah mengurus/ membuat SKCK baru akan mencari/melamar pekerjaan di swalayan daerah Kecamatan Loa Janan.</p> <p>Langkah Penanganan : Melakukan koordinasi dengan aparat intelijen dan keamanan untuk melaksanakan pemantauan kegiatan ybs.</p> | |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | menjaga istrinya yang dalam kondisi hamil ± 6 bulan. Bbatas waktu SKCK Sdr. Ridho Pratama Putra dari Polres Kukar habis (Nopember 2019), maka rencananya Sdr. Ridho Pratama Putra akan membuat/ mengurus SKCK baru di Kantor Desa Purwajaya dimana statusnya sebagai Eks Napiter tidak dimasukkan sehingga dapat mencari/melamar pekerjaan dengan mudah. | Catatan : Ridho Pratama Putra telah menyampaikan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaah - perusahaan tersebut Kepada Badan Nasional Penggulangan Teroris (BNPT) dan meminta Badan Nasional Penggulangan Teroris (BNPT) agar dapat membantu, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut. |
|--|--|---|---|

Tujuan 3 :

Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran Strategis III : Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis III

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang | 60% | 20% | 40% | 58,32% |
| Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat | 205 kasus | 469 kasus | 359 kasus | 318 kasus |

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator penurunan kasus penyakit masyarakat tidak tercapai namun menurun dari tahun sebelumnya hal



ini berakibat pada tingginya angka kriminalitas, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarnya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparaturnya dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Mas telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang dan Peringatan hari-Hari Besar/Nasional, dengan target capaian pada tahun 2019 sebesar 60%. Dalam hal pencapaian pada indikator ini bukan merupakan hal mendasar namun hanya pada tingkat kehadiran peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dimana pada kegiatan Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang yang direncanakan hadir dengan 250 orang peserta, hanya dihadiri oleh 243 orang.

Pendataan tenaga kerja asing di Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah dilaksanakan dengan hasil lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya dan terjaringnya beberapa TKA yang tidak memiliki legalitas untuk bekerja di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diproses untuk diserahkan kepada Kantor Imigrasi di Samarinda, adapun data TKA di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :

Data Sebaran Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) di Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 – 2019

| No. | Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Samboja | 5 Orang | 5 Orang | - |
| 2. | Muara jawa | 79 Orang | 79 Orang | - |
| 3 | Sanga-sanga | - | - | - |
| 4 | Marang kayu | - | - | - |
| 5 | Muara badak | - | - | - |
| 6 | Anggana | 1 Orang | 1 Orang | - |
| 7 | Loa Janan | - | - | - |
| 8 | Loa Kulu | 5 Orang | 5 Orang | 4 Orang |
| 9 | Tenggarong | - | - | - |
| 10 | Sebulu | 1 Orang | 1 Orang | - |
| 11 | Muara Kaman | 7 Orang | 7 Orang | - |
| 12 | Tenggarong Seberang | 3 Orang | 3 Orang | 77Orang |
| 13 | Kota Bangun | - | - | - |
| 14 | Muara Wis | - | - | - |
| 15 | Muara Muntai | - | - | - |
| 16 | Kenohan | - | - | - |
| 17 | Kb. Janggut | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang |
| 18 | Tabang | 13 Orang | 13 Orang | - |
| | Jumlah | 129 Orang | 129 Orang | 96 Orang |



Indikator II : Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2019 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesbangpol menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukkan negative dalam pemakaian narkoba.

2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparaturnya Badan Kesbangpol dalam 2 tahun berturut-turut, dengan harapan para aparaturnya bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara :

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2017 – 2019

| No. | Jenis Kriminal | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Narkoba | 255 | 235 | 219 |
| 2 | Pembunuhan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kejahatan Seksual | 18 | 29 | 24 |
| 4 | Penganiayaan | 60 | 31 | 13 |
| 5 | Pencurian | 124 | 34 | 33 |
| 6 | Eksplorasi Anak Bawah Umum | 9 | 29 | 22 |
| 7 | Premanisme | 1 | - | 4 |
| | JUMLAH | 469 | 359 | 318 |

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 469 kasus, telah terjadi penurunan drastis pada tahun 2018 sebanyak 359 kasus dan pada tahun 2019 menurun lagi sebanyak 41 kasus menjadi 318 kasus, namun hal tersebut masih jauh dari yang menjadi target Badan Kesbangpol



sebanyak 205 kasus, dengan kegagalan pencapaian indikator ini akan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Tujuan 4 :

Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi dan Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

| Indikator Sasaran | Target | Realisasi | | |
|--|--------|-----------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | 70% | 58,93% | 60,44% | 81,24% |
| Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi | 80% | 45% | 53,33% | 40% |
| Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari 3 (tiga) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada tahun 2019, sementara 2 (dua) indikator telah



mencapai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi dari target, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari ketiga indikator tersebut :

a. Indikator I : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2014 – 2018 yang tertinggi hanya pada Pileg 2014 sebesar 68,46%, namun hal ini belum cukup untuk mencapai target 70% dan hal ini akhirnya bisa dicapai pada tahun 2019 ini pada gelaran Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden dengan tingkat partisipasi sebesar 81,24%, hal ini disebabkan oleh banyaknya kepentingan politik pada proses pemilu ini sehingga partisipasi bisa meningkat dan pelaksanaannya secara serentak, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % pada periode tersebut, namun dengan pencapaian ini tetap akan dilakukan evaluasi dimana angka pemilih yang masih rendah. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya pada tahun 2020 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini telah baik karena masih diatas 80% yang berarti capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

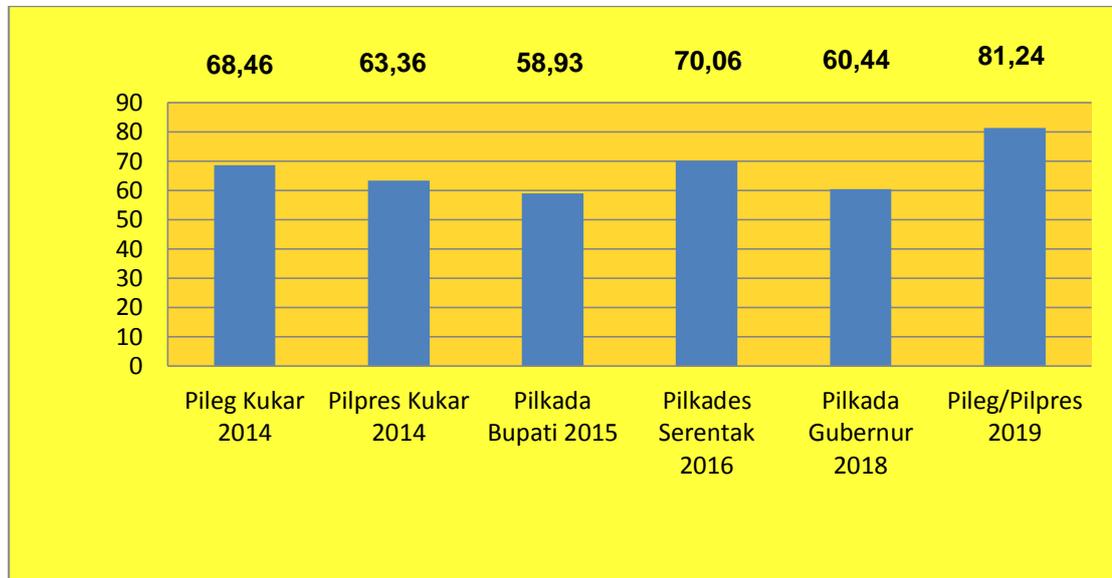
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2014-2019

| INDIKATOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu | 1. Pileg : 68,46% 2. Pilpres : 63,36% | Pilbup : 58,93% | Pilkades : 70,06% | Pilgub : 60,44 | Pileg/Pilpres : 81,24 |



GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dengan demikian sesuai data diatas bahwa capaian indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% dan realisasi 81,24% diambil dari hasil Pileg/Pilpres tahun 2019 dengan capaian 100%

b. Indikator II : Persenstase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 80% dengan realisasi 40% sehingga capaian 50%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 8 ormas menjadi 12 ormas pada tahun 2019, meskipun meningkat, namun peningkatan ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Bdan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2014 – 2019

| NO | ORMAS | TAHUN (JUMLAH) | | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | ORMAS | 12 | 4 | - | 2 | 3 | 4 |
| 2. | OKP | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 3. | LSM | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 4. | PAGUYUBAN | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
| 5. | AGAMA | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | PROFESI | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | - |
| 7. | LEMBAGA ADAT | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| 8. | YAYASAN | - | - | - | - | - | 2 |
| | JUMLAH | 28 | 24 | 19 | 9 | 8 | 12 |



Data Organisasi Masyarakat Terdaftar tahun 2019 (berdasarkan sebaran di kecamatan)

| No | Kecamatan | Ormas | OKP | LSM | Paguyuban | Keagamaan | Profesi | Yayasan | Jumlah |
|----|---------------------|-------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | Marangkayu | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Muara badak | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Samboja | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Muara Jawa | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Sanga-sanga | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Anggana | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Loa Janan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Loa Kulu | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Tenggarong Seberang | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10 | Tenggarong | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 7 |
| 11 | Sebulu | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Muara Kaman | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Kota bangun | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Muara Wis | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Muara Muntai | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Kenohan | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Kembang janggut | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Tabang | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | Jumlah | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |

c. Indikator III : Persenstase Parpol Yang Tertib Administrasi

Terkait dengan parpol pada fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2019, seluruh parpol telah diverifikasi dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dan persyaratan verifikasi. Pada tahun 2019 proses bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap pertama bagi Parpol hasil Pemilu Legislatif Periode tahun 2014-2019 terdapat 8 (delapan) Parpol dan tahap kedua bagi parpol hasil Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) Parpol.

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PERIODE 2014-2019

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN KURSI | PEROLEHAN SUARA PEMILU 2014 | NILAI BANTUAN | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 3 Kursi | 20.266 Suara | 44.922.970 | Lengkap |
| 2. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 Kursi | 37.058 Suara | 82.145.233 | Lengkap |
| 3. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 19 Kursi | 137.141 Suara | 303.995.880 | Lengkap |
| 4. | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 Kursi | 32.093 Suara | 71.139.480 | Lengkap |
| 5. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 Kursi | 30.898 Suara | 68.490.570 | Lengkap |
| 6. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 Kursi | 13.006 Suara | 28.829.970 | Lengkap |
| 7. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 4 Kursi | 20.471 Suara | 45.377.380 | Lengkap |
| 8. | PARTAI BULAN BINTANG | 1 Kursi | 8.319 Suara | 18.440.450 | Lengkap |
| JUMLAH | | 45 Kursi | 299.252 Suara | 663.341.930 | |

Dari 12 Partai Politik pada 2014 menjadi 8 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2014, ada 8 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2019.



DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PERIODE 2019-2024

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

| NO | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN KURSI | PEROLEHAN SUARA PEMILU 2014 | NILAI BANTUAN | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 Kursi | 34.286 Suara | 54.286.170 | Lengkap |
| 2. | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 Kursi | 46.667 Suara | 73.889.420 | Lengkap |
| 3. | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 Kursi | 45.361 Suara | 71.821.583 | Lengkap |
| 4. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 13 Kursi | 95.345 Suara | 150.962.920 | Lengkap |
| 5. | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | 2 Kursi | 20.373 Suara | 32.257.250 | Lengkap |
| 6. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 3 Kursi | 23.250 Suara | 36.812.500 | Lengkap |
| 7. | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 1 Kursi | 14.340 Suara | 22.705.000 | Lengkap |
| 8. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 Kursi | 16.764 Suara | 26.543.000 | Lengkap |
| 9. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 Kursi | 34.071 Suara | 53.945.750 | Lengkap |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 Kursi | 12.410 Suara | 19.649.170 | Lengkap |
| JUMLAH | | 45 Kursi | 342.867 Suara | 542.872.760 | |

Dari 16 Partai Politik pada 2019 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, ada 10 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2019.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 100%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh Parpol. Agar parpol



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada tahun berikutnya.

ANALISIS CAPAIAN MENURUT IKU KABUPATEN :

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, ada 2 (dua) Indikator Pembangunan yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Jumlah Konflik/Gejolak.
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Berdasarkan indikator tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Indikator Jumlah Konflik/Gejolak,**

Berdasarkan data dari Bidang Idiologi dan Wasbang jumlah kasus dan konflik sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2 kejadian, dan ditahun 2019 sebanyak 1 kejadian maka dapat dikatakan ada penurunan atau keberhasilan dalam menekan/menangani jumlah dari tahun sebelumnya.

Indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, di tahun 2019 pada Pemilihan Umum Serentak Legislatif dan Presiden, dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 81,24 %, dimana hasil sangat tinggi daripada Pemilu sebelumnya dengan realisasi mencapai angka 100% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Untuk itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu upaya-upaya yang di lakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong meningkatkan partisipasi pilitik masyakat pada tahun 2020 yang akan datang.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Pada tahun 2019 Total Anggaran belanja Badan Kebangpol Rp. 12.510.754.074,52 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBD-P). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 11.402.717.568,00 (91,14%) pada tahun ini mengalami penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2018 sebesar (91,17%). Sedangkan untuk belanja langsung juga mengalami penurunan menjadi 94,62% dari tahun 2018 sebesar 96,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan rincian per kegiatan sebagai berikut :

| No | Fokus | Jenis Data | Anggaran | Realisasi | Sisa | (%) |
|----|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1. | Alokasi Anggaran SKPD | Total Anggaran SKPD | 12.510.754.074,52 | 11.402.717.568,00 | 1.108.036.506,52 | 91,14 |
| 2. | Kesbangpol | Alokasi Belanja Langsung | 4.961.514.291,00 | 4.694.589.568,00 | 266.924.723,00 | 94,62 |
| 3. | | Alokasi Belanja Tak Langsung | 7.549.239.783,52 | 6.708.128.000,00 | 841.111.783,52 | 88,68 |
| 4. | | Besaran Belanja Barang dan Jasa | 4.276.234.891,00 | 4.053.559.668,00 | 222.675.223,00 | 94,79 |
| 5. | | Besaran Belanja Pegawai | 651.611.400,00 | 610.204.900,00 | 41.406.500,00 | 93,65 |
| . | | Besaran Belanja Modal | 33.668.000,00 | 30.825.000,00 | 2.843.000,00 | 91,56 |
| . | | Total Belanja SKPD | 12.510.754.074,52 | 11.402.717.568,00 | 1.108.036.506,52 | 91,14 |
| . | | Belanja Pemeliharaan | 50.000.000,00 | 49.605.000,00 | 395.000,00 | 99,21 |



**PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN
SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL**

| Sasaran Strategis I : | | | | Program : | | |
|---|---------------|------------------|----------|--|------------------|----------|
| Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja aparatur dilingkungan Badan Kesbangpol | | | | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Anggaran | | |
| | | | | Pagu | Realisasi | % |
| Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 97,39% | 97,39 | 933.959.691 | 862.893.345 | 92,39 |
| | | | | Program : | | |
| | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100 | 85.000.000 | 81.762.000 | 96,19 |
| | | | | Program : | | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |
| Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100 | 50.000.000 | 43.574.800 | 87,15 |
| | | | | Program : | | |
| | | | | Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan | | |
| Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100 | 145.000.000 | 137.975.000 | 95,16 |
| Sasaran Strategis II : | | | | Program : | | |
| Berkurangnya Potensi Konflik di Masyarakat | | | | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | |
| Cakupan Penanganan Konflik | 100% | 100% | 100 | 625.000.000 | 582.264.398 | 93,16 |
| Cakupan Penanganan Gejala Masyarakat | 100% | 100% | 100 | 75.000.000 | 74.938.200 | 99,92 |
| Sasaran Strategis III : | | | | Program : | | |
| Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | | | | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | |
| Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan | 60% | 58,32% | 97,20 | 1.068.061.800 | 1.003.206.000 | 93,93 |
| Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat | 205 kasus | 318 kasus | 0 | 139.155.000 | 139.155.000 | 100 |
| Sasaran Strategis IV : | | | | Program : | | |
| Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat | | | | Pendidikan Politik Masyarakat | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Anggaran | | |
| | | | | Pagu | Realisasi | % |
| Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | 70% | 81,24% | 100 | 1.465.337.800 | 1.414.224.200 | 96,51 |
| Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi | 80% | 40% | 50 | 300.000.000 | 283.246.625 | 94,42 |
| Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi | 100% | 100% | 100 | 75.000.000 | 71.350.000 | 95,13 |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 4.961.514.291,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2019 : Rp. 4.694.589.569,-(94,62)



ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah dilakukan efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan, sehingga sesuai dengan tabel diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 71.066.346,- namun hal ini bukan kesalahan dalam proses perencanaan awal namun adanya penekanan biaya minimal dan tidak mengurangi output dari kegiatan tersebut

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam program ini pelaksanaan kegiatan pengadaan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ada sehingga terdapat efisiensi penggunaan dana sesuai dengan HPS dan penawaran dari penyedia masih dibawah dari HPS yang ada, kemudian terkait pemeliharaan juga dilaksanakan secara selektif dan skala prioritas terhadap suku cadang kendaraan yang dinilai masih layak tidak dilakukan penggantian.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam program ini hanya dilaksanakan 1 kegiatan terkait Fasilitasi Tim Bekias OPD, dalam kegiatan ini telah menghasilkan inovasi berupa aplikasi yang dikerjakan sendiri oleh tim bekias OPD sehingga hanya diperlukan biaya rapat dan honorarium untuk tim dan belanja lain terkait pelaporan yang telah dilaksanakan secara efisien dalam penggunaan sumber daya.

4. Program Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam program ini juga telah dilakukan efisiensi sumber daya terkait belanja-belanja untuk kelengkapan pelaporan termasuk rapat-rapat yang dilaksanakan.



5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga porsi besar pada belanja perjalanan dinas, dimana dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas telah dilakukan pada lokasi yang dianggap rawan konflik dan gejolak, kemudian untuk personel yang ditugaskan juga dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan monitoring.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, namun hal ini telah dilakukan antisipasi dari pengeluaran yang banyak dengan pembatasan jumlah peserta sesuai dengan yang terdapat dalam DPA.

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dalam program ini penggunaan sumber daya yang ada digunakan secara maksimal dengan tujuan untuk memaksimalkan lokasi pemetaan kasus penyakit masyarakat di 18 Kecamatan.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini dominan pada pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga porsi besar pada belanja perjalanan dinas, dimana dalam proses pelaksanaan perjalanan dinas telah dilakukan pada lokasi yang dianggap penting terkait data Pemilu dan verifikasi Ormas, kemudian untuk personel yang ditugaskan juga dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan monitoring.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2020
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2018 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | | | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 | | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | | |
|----|--------------------|--|--|---|--------------|---|--------------|--|--------------|-------|--------------|-------------|--------|--|--------------|--|--------------|---------------|--------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7x100 | | 10 | | 11 = 6+8+10 | | 12 = 11/5x100 | |
| | | | | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan | K | Satuan |
| | 1.05 | URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.1.05.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100 | persen | 100 | persen | 100 | persen | 97,39 | persen | 97,39 | persen | 100,00 | persen | 67,34 | persen | 67,34 | persen |
| 1 | 1.05.1.05.03.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 1.806 | lembar | 406 | lembar | 500 | lembar | 500 | lembar | 100,00 | persen | 400 | lembar | 1.306 | lembar | 72,31 | persen |
| 2 | 1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 728 | rekening | 288 | rekening | 146 | rekening | 144 | rekening | 98,63 | persen | 146 | rekening | 578 | rekening | 79,40 | persen |
| 3 | 1.05.1.05.03.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | 209 | unit | 76 | unit | 42 | unit | 28 | unit | 66,67 | persen | 42 | unit | 146 | unit | 69,86 | persen |
| 4 | 1.05.1.05.03.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | 555 | orang/bulan | 195 | orang/bulan | 180 | orang/bln | 176 | orang/bln | 97,78 | persen | - | - | 371 | orang/bln | 66,85 | persen |
| 5 | 1.05.1.05.03.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan yang diperbaiki | 86 | unit | 20 | unit | 25 | unit | 25 | unit | 100,00 | persen | 18 | unit | 63 | unit | 73,26 | persen |
| 6 | 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | 135 | item | 54 | item | 27 | item | 27 | item | 100,00 | persen | 27 | item | 108 | item | 80,00 | persen |
| 7 | 1.05.1.05.03.01.16 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 28 | cetakan | 13 | cetakan | 5 | cetakan | 5 | cetakan | 100,00 | persen | 5 | cetakan | 23 | cetakan | 82,14 | persen |
| 8 | 1.05.1.05.03.01.18 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 226 | buah | - | buah | - | buah | - | buah | - | persen | 113 | buah | 113 | buah | 50,00 | persen |
| 9 | 1.05.1.05.03.01.19 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | eksemplar | - | eksemplar | - | eksemplar | - | eksemplar | - | persen | - | eksemplar | - | eksemplar | - | persen |
| 10 | 1.05.1.05.03.01.20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 42 | jenis barang | - | jenis barang | - | jenis barang | - | jenis barang | - | persen | 21 | jenis barang | 21 | jenis barang | 50,00 | persen |
| 11 | 1.05.1.05.03.01.20 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | 658 | paket | 277 | paket | 127 | paket | 127 | paket | 100,00 | persen | 127 | paket | 531 | paket | 80,70 | persen |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2018 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 | | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|---|----------------------|---|---------------|--|---------------|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|---|--------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | TARGET RENJA PD TAHUN 2019 | | REALISASI RENJA PD TAHUN 2019 | | | TINGKAT REALISASI | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA | | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7x100 | | 10 | | 11 = 6+8+10 | | 12 = 11/5x100 | |
| 12 | 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan rapat-rapat | 834 | o/h | 230 | o/h | 199 | o/h | 199 | o/h | 100,00 | persen | 230 | o/h | 659 | o/h | 79,02 | persen |
| 13 | 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 1.329 | orang/bulan | 531 | orang/bulan | 264 | orang/bln | 246 | orang/bln | 93,18 | persen | 240 | orang/bln | 1.017 | orang/bln | 76,52 | persen |
| 14 | 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 | item | - | item | - | item | - | item | - | persen | 25 | item | 25 | item | 50,00 | persen |
| 15 | 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 | Penataan Arsip Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Arsip | 2.200 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | persen | 2.200 | dokumen | 2.200 | dokumen | 100,00 | persen |
| | 1.05 . 1.05.03 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik | 88 | persen | 83 | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 60,92 | persen | 69,23 | persen |
| 16 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 87 | unit | 77 | unit | 10 | unit | 8 | unit | 80,00 | persen | - | unit | 85 | unit | 97,70 | persen |
| 17 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 20 | unit | - | unit | - | unit | - | unit | - | persen | 2 | unit | 2 | unit | 10,00 | persen |
| 18 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 6 | unit | 2 | unit | - | unit | - | unit | - | persen | 2 | unit | 4 | unit | 66,67 | persen |
| 19 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 172 | unit | 70 | unit | 34 | unit | 34 | unit | 100,00 | persen | 34 | unit | 138 | unit | 80,23 | persen |
| 20 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 50 | unit | - | unit | - | unit | - | unit | - | persen | 25 | unit | 25 | unit | 50,00 | persen |
| | 1.05 . 1.05.03 . 02 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Surat Teguran | 3 | surat teguran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.05 . 1.05.03 . 02 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | 87,39 | persen | 87,14 | persen | 87,14 | persen | 87,14 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 33,33 | persen | 38,14 | persen |
| 23 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | - | orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 | Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah | Jumlah Inovasi | 3 | inovasi | - | inovasi | 1 | inovasi | 1 | inovasi | 100,00 | persen | 1 | inovasi | 2 | inovasi | 66,67 | persen |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2018 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 | | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|---|---|------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | TARGET RENJA PD TAHUN 2019 | REALISASI RENJA PD TAHUN 2019 | | TINGKAT REALISASI | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7x100 | | 10 | | 11 = 6+8+10 | | 12 = 11/5x100 | |
| | 1.05 . 1.05.03 . 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | 100 | persen | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 91,67 | persen | 91,67 | persen |
| 25 | 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Laporan Akhir | Jumlah laporan keuangan | 20 | dokumen | 5 | dokumen | 5 | dokumen | 5 | dokumen | 100,00 | persen | 5,00 | dokumen | 15 | dokumen | 75,00 | persen |
| 26 | 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | 3 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | persen | 3,00 | dokumen | 3 | dokumen | 100,00 | persen |
| 27 | 1.19 . 1.19.01 . 06 . 05 | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah | 2 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | persen | 2,00 | dokumen | 2 | dokumen | 100,00 | persen |
| | | | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100 | persen | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 80,00 | persen | 80,00 | persen |
| 28 | 1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev | Tersedianya dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJIP dan Monev | 30 | dokumen | 12 | dokumen | 6 | dokumen | 6 | dokumen | 100,00 | persen | 6,00 | dokumen | 24 | dokumen | 80,00 | persen |
| | | | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100 | persen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1.19 . 1.19.01 . 06 . 08 | Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat | Jumlah Laporan | 30 | laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.05 . 1.05.03 . 15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 1. Cakupan penanganan konflik | 100 | persen | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 84,64 | persen | 84,64 | persen |
| 30 | 1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 | Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah | Jumlah laporan Penanganan Konflik | 814 | laporan | 14 | laporan | 300 | laporan | 300 | dokumen | 100,00 | persen | 250 | laporan | 564 | laporan | 69,29 | persen |
| 31 | 1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 | Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi | 100 | orang | - | orang | 100 | dokumen | 100 | dokumen | 100,00 | persen | - | orang | 100 | orang | 100,00 | persen |
| | | | 2. Cakupan penanganan gejala masyarakat | 100 | persen | - | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 80,95 | persen | 80,95 | persen |
| 32 | 1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 | Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar | Jumlah laporan pemantauan | 63 | laporan | 15 | laporan | 18 | laporan | 18 | laporan | 100,00 | persen | 18 | laporan | 51 | laporan | 80,95 | persen |
| | 1.05 . 1.05.03 . 17 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang | 100 | persen | 40 | persen | 60 | persen | 58,32 | persen | 97,20 | persen | 80,00 | persen | 77,99 | persen | 77,99 | persen |
| 33 | 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 | Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan | 5.344 | orang | 350 | orang | 400 | orang | 400 | orang | 100,00 | persen | 2.522 | orang | 3.272 | orang | 61,23 | persen |
| 34 | 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 | Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 910 | orang | - | orang | 250 | orang | 243 | orang | 97,20 | persen | 560 | orang | 803 | orang | 88,24 | persen |
| 35 | 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 | Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga | Jumlah lokasi Pengawasan | 18 | kecamatan | 9 | kecamatan | 9 | kecamatan | 9 | kecamatan | 100,00 | persen | - | kecamatan | 18 | kecamatan | 100,00 | persen |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2018 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | | | | | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | | TARGET RENJA PD TAHUN 2019 | | REALISASI RENJA PD TAHUN 2019 | | TINGKAT REALISASI | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7x100 | | 10 | | 11 = 6+8+10 | | 12 = 11/5x100 | |
| 36 | 1.05 . 1.05.03 . 17 . 02 | Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional | Jumlah upacara | 8 | upacara | - | upacara | 2 | upacara | 2 | upacara | 100,00 | persen | 3 | upacara | 5 | upacara | 62,50 | persen |
| | | | 2.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | 100 | persen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 | Fasilitasi Ketahanan Budaya | Jumlah peserta | - | orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah | Jumlah yang difasilitasi | - | orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.05 . 1.05.03 . 20 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat | 100 | persen | 40 | persen | 60 | persen | 60 | persen | 100,00 | persen | 80 | persen | 194,44 | persen | 194,44 | persen |
| 39 | 1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 450 | orang | 150 | orang | 200 | orang | 200 | orang | 100,00 | persen | 1.600 | orang | 1.950 | orang | 433,33 | persen |
| 40 | 1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 40 | orang | 40 | orang | - | orang | - | orang | - | persen | - | orang | 40 | orang | 100,00 | persen |
| 41 | 1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Jumlah Dokumen | 36 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | persen | 18 | dokumen | 18 | dokumen | 50,00 | persen |
| | 1.05 . 1.05.03 . 21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik | 100 | persen | 40,00 | persen | 60 | persen | 59,23 | persen | 98,72 | persen | 80,00 | persen | 60,80 | persen | 60,80 | persen |
| 42 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 | Pendidikan Politik Bagi Masyarakat | Jumlah peserta | 1.100 | orang | 100 | orang | - | orang | - | orang | - | persen | - | orang | 100 | orang | 9,09 | persen |
| 43 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | 200 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | persen | - | laporan | - | laporan | - | persen |
| 44 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum | Jumlah peserta dan laporan | 9.500 | orang | 4.580 | orang | 3.200 | orang | 3.159 | orang | 98,72 | persen | 5.000 | orang | 12.739 | orang | 134,09 | persen |
| 45 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 | Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Bantuan Keuangan Provinsi) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | 3.585 | orang | 3.585 | orang | - | orang | - | orang | - | persen | - | orang | 3.585 | orang | 100,00 | persen |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d. 2021 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2018 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 | | | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 | | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | | TARGET RENJA PD TAHUN 2019 | | REALISASI RENJA PD TAHUN 2019 | | TINGKAT REALISASI | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7x100 | | 10 | | 11 = 6+8+10 | | 12 = 11/5x100 | |
| | | | 2. Persentase ormas yang tertib administrasi | 100 | persen | 75,00 | persen | 80 | persen | 40,00 | persen | 50,00 | persen | 90,00 | persen | 38,83 | persen | 38,83 | persen |
| 46 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 | Fasilitasi organisasi kemasyarakatan | Jumlah Ormas yang difasilitasi | 104 | ormas | 24 | ormas | 30 | ormas | 12 | ormas | 40,00 | persen | 20 | ormas | 56 | ormas | 53,85 | persen |
| 47 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 07 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah | Jumlah peserta | 210 | orang | - | orang | - | orang | - | orang | - | persen | 50 | orang | 50 | orang | 23,81 | persen |
| | | | 3. Persentase parpol yang tertib administrasi | 100 | persen | 100,00 | persen | 100 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 100,00 | persen | 37,50 | persen | 37,50 | persen |
| 48 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 | Fasilitasi Partai Politik | Jumlah parpol yang difasilitasi | 64 | parpol | 16 | parpol | 16 | parpol | 16 | parpol | 100,00 | persen | 16 | parpol | 48 | parpol | 75,00 | persen |
| 49 | 1.05 . 1.05.03 . 21 . 08 | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas | Jumlah peserta | 50 | orang | - | orang | - | orang | - | orang | - | persen | - | orang | - | dokumen bankeu | - | persen |



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

PANDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Periode pembangunan tahun 2016 s/d 2021, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2019. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan dilakukan pada tahun 2018, pembinaan politik di daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar 36 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2018, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai serta legitimate. Sedangkan untuk tahun 2019 capaian menurun disebabkan oleh keterbatasan anggaran, dan untuk tahun 2020 kegiatan pembinaan politik diharapkan meningkat lagi sedangkan untuk pembinaan ormas juga meningkat walaupun terdapat regulasi yang membatasi dan untuk 2021 dan 2022 diharapkan akan sesuai dengan target pada renstra dengan didukung pendanaan yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan. Selengkapnya dapat disampaikan pada tabel berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

| NO | INDIKATOR | SPM/STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|----|--|----------------------|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 (Triwulan I) | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | - | III.3 | 65 kegiatan | 44 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 36 kegiatan | 6 kegiatan | 2 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | |
| 2 | Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP | - | III.3 | 30 kegiatan | 25 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 8 kegiatan | 3 kegiatan | 1 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | |


 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
RINDA SANTI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|---|
| 1 | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol | Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja |
| 2 | Situasi keamanan daerah yang belum stabil | Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 3. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat |
| 3 | Masih rendahnya pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan | Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | <ol style="list-style-type: none">1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat |
| 4 | Menurunnya kualitas demokrasi di daerah | Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku3. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum4. Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah |

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol



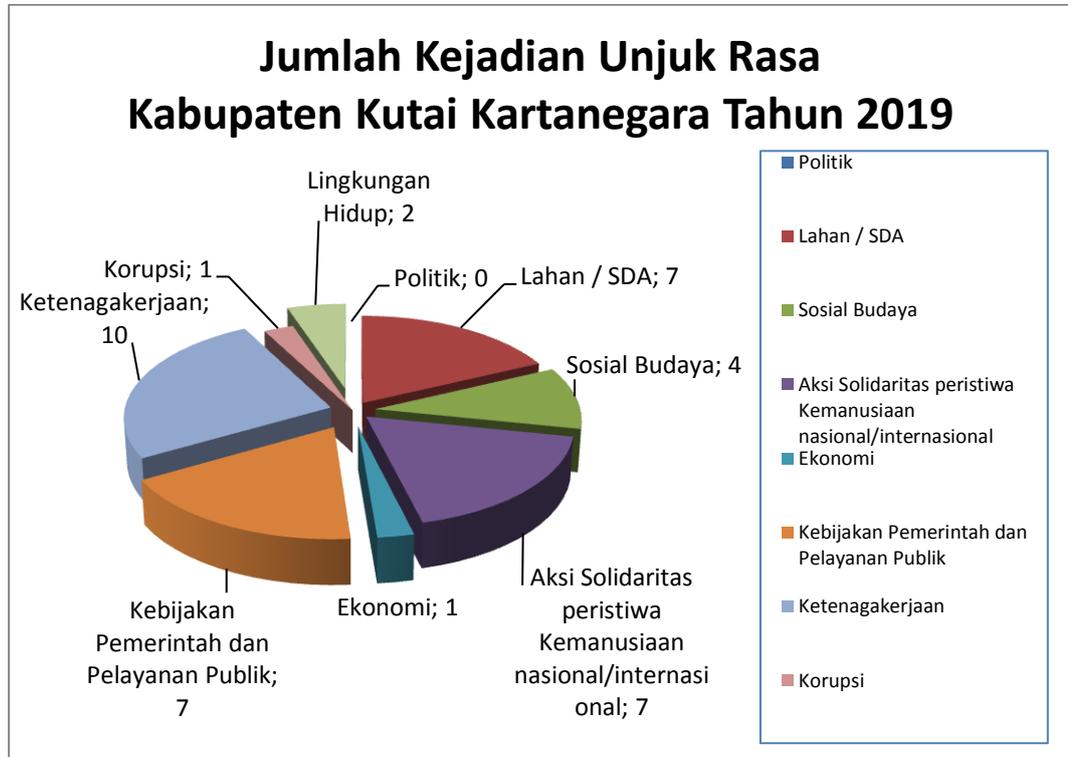
RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol
- d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

| Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| B | B | B | B | B |



2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat



3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2017 – 2019

| No. | Jenis Kriminal | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Narkoba | 255 | 235 | 219 |
| 2 | Pembunuhan | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Kejahatan Seksual | 18 | 29 | 24 |
| 4 | Penganiayaan | 60 | 31 | 13 |
| 5 | Pencurian | 124 | 34 | 33 |
| 6 | Eksplotasi Anak Bawah Umum | 9 | 29 | 22 |
| 7 | Premanisme | 1 | - | 4 |
| | JUMLAH | 469 | 359 | 318 |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2014 – 2019

| NO | ORMAS | TAHUN (JUMLAH) | | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | ORMAS | 12 | 4 | - | 2 | 3 | 4 |
| 2. | OKP | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
| 3. | LSM | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 4. | PAGUYUBAN | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
| 5. | AGAMA | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | PROFESI | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | - |
| 7. | LEMBAGA ADAT | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| 8. | YAYASAN | - | - | - | - | - | 2 |
| | JUMLAH | 28 | 24 | 19 | 9 | 8 | 12 |

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2014-2019

| INDIKATOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu | 3. Pileg : 68,46% 4. Pilpres : 63,36% | Pilbup : 58,93% | Pilkades : 70,06% | Pilgub : 60,44 | Pileg/Pilpres : 81,24 |



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.



3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.



5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).



Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan



Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam



memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.



8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru (Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah) dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah.



- C. Seringnya terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang dan perkebunan, kepemilikan lahan tumpang tindih yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid, kemudian tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga mengganggu iklim investasi
- D. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian.
- E. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksekusi degradasi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- F. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA.
- G. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
- H. Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba).
- I. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan saluran aspirasi.

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

| NO. | MASALAH | AKAR MASALAH | ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Munculnya konflik dan gejala di masyarakat | Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan rendahnya kualitas pelayanan umum | Pemerintah memfasilitasi seluruh stake holders terkait dalam suatu Forum/Tim dalam penyelesaian berbagai konflik dan gejala yang timbul serta perlunya sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya radikalisme dan terorisme | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah |
| 2 | | Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru | | | Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme |
| 3 | | Seringnya terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang dan perkebunan, kepemilikan lahan tumpang tindih yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid, kemudian tidak terserapnya tenaga kerja lokal | | | Pemantauan Dampak Kenaikan /Kelangkaan Harga dan Barang Pasar |
| 4 | | Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian. | | | |
| 5 | | Sering munculnya gejala di masyarakat yang disebabkan kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat akibat penimbunan dan permainan harga oleh produsen | | | |
| 6 | Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksedens moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta masuknya orang asing secara ilegal | Pemerintah melaksanakan program pendidikan wawasan kebangsaan dan melakukan sosialisasi dan melaksanakan ToT bagi para pengajar tentang wawasan kebangsaan dan pancasila serta sosialisasi dan penyuluhan | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah |
| 7 | | Munculnya berbagai Isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA. | | | Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional |
| 8 | | Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara | | | Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan |
| 9 | | Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba). | | | Pemerintah melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan kegiatan yang positif bagi para pemuda khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya |
| | | | | | Fasilitasi Ketahanan Budaya |
| | | | | | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah |

| NO. | MASALAH | AKAR MASALAH | ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya |
| | | | | | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi |
| | | | | | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika |
| 10 | Menurunnya partisipasi politik masyarakat | Kurangnya pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi politik | Pemerintah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah |
| 11 | | Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilu yang tidak demokratis | | | Pendidikan Politik Bagi Masyarakat |
| 12 | | Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi dan adanya peraturan baru yang belum diketahui dan dipahami | Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan pengurus partai politik | | Fasilitasi Partai Politik |
| | | Kurangnya pemahaman para pengurus Partai Politik dalam permasalahan administrasi penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik | | | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas |
| | | | | | Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |

Tenggarong, Maret 2020

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIR. 19691226 200112 2 002



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- J. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput.
- K. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
- L. Peningkatan pelaporan pemantauan perkembangan politik di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan peningkatan pemahaman politik masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah 2021 dimana Badan Kesbangpol termasuk pada prioritas pertama yaitu “Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Integrasi Data dan Layanan Berbasis Teknologi dan Informasi”. Dalam rancangan awal ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol di dalam rancangan awal RKPD 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi

| SASARAN DAERAH | INDIKATOR DAERAH | STRATEGI DAERAH | KEBIJAKAN DAERAH | PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2021 | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|---|------|
| Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Integrasi Data dan Layanan Berbasis Teknologi dan Informasi | | | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB) | Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Penguatan Kapasitas Keamanan Lingkungan Berbasis Masyarakat | Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Cakupan penanganan konflik | 100% | |
| | | | | | Cakupan penanganan gejala masyarakat | 100% | |
| | | | | | Pendidikan politik masyarakat | Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik | 100% |
| | | | | | | Persentase ormas yang tertib administrasi | 100% |
| | | | | | | Persentase parpol yang tertib administrasi | 100% |
| | | | | | | | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2016-2021 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada tahun 2021 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kegiatan prioritas terutama untuk mendukung kelancaran dan situasi kondusif pasca pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020 dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dari penjabaran rancangan awal RKPD tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang program dan kegiatan. Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 dapat disampaikan pada tabel berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesbangpol tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang masuk dari masyarakat, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | RANCANGAN AWAL RKPd/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|--------|--|-----------------|-------------------------|--|--------|--|-----------------|-------------------------|--|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 1.122.358.000,89 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 1.365.578.000,89 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | OPD | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 500 lembar | 2.400.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | OPD | Jumlah Jasa Surat Menyurat | 500 lembar | 2.400.000,00 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | OPD | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 146 rekening | 130.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | OPD | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 146 rekening | 130.000.000,00 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | OPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | 42 unit | 13.050.000,18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | OPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | 42 unit | 13.050.000,18 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OPD | Jumlah jasa administrasi keuangan | - | - | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | OPD | Jumlah jasa administrasi keuangan | - | - | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | OPD | Jumlah Peralatan yang diperbaiki | 18 unit | 10.000.000,00 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | OPD | Jumlah Peralatan yang diperbaiki | 18 unit | 8.000.000,00 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | OPD | Jumlah Alat Tulis Kantor | 27 item | 45.614.651,06 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | OPD | Jumlah Alat Tulis Kantor | 27 item | 35.741.472,08 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | OPD | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 5 cetakan | 55.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | OPD | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 5 cetakan | 30.000.000,00 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | OPD | Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 113 buah | 10.000.000,27 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | OPD | Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 113 buah | 5.000.000,27 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | OPD | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | OPD | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | OPD | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 21 jenis barang | 10.000.000,04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | OPD | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 21 jenis barang | 8.000.000,04 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|--------|--|-----------------|-----------------------|---|--------|--|-----------------|-----------------------|--|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | OPD | Jumlah Makanan dan Minuman | 127 paket | 10.000.000,32 | Penyediaan Makanan dan Minuman | OPD | Jumlah Makanan dan Minuman | 127 paket | 10.000.000,32 | |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | OPD | Jumlah kegiatan rapat-rapat | 320 o/h | 556.690.149,00 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | OPD | Jumlah kegiatan rapat-rapat | 300 o/h | 510.000.000,00 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | OPD | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 264 orang/bulan | 229.603.200,02 | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | OPD | Jumlah Tenaga Harian Lepas | 240 orang/bulan | 378.386.528,00 | penambahan pagu terkait besaran upah THL sesuai surat edaran penyusunan RKA tahun 2020 |
| 14 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | OPD | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25 item | 50.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | OPD | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25 item | 35.000.000,00 | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain |
| 15 | Penataan Arsip Perangkat Daerah | OPD | Jumlah Dokumen Arsip | - | - | Penataan Arsip Perangkat Daerah | OPD | Jumlah Dokumen Arsip | 2.200 dokumen | 200.000.000,00 | penambahan pagu sesuai instruksi bupati kucar untuk pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah |
| | | | Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip | - | - | | | Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip | - | - | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik | 88% | 115.000.000,00 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik | 88% | 362.000.000,00 | |
| 16 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | OPD | Jumlah perlengkapan gedung kantor | - | - | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | OPD | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 4 unit | 35.000.000,00 | penambahan pagu terkait pengadaan AC untuk mengganti AC yang sudah rusak |
| 17 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | OPD | Jumlah peralatan gedung kantor | 10 unit | 35.000.000,00 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | OPD | Jumlah peralatan gedung kantor | 18 unit | 127.000.000,00 | penambahan pagu untuk pengadaan PC dan printer/scanner yang masih kurang |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------|-----------------------|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | OPD | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 2 unit gedung | 20.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | OPD | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 2 unit gedung | 100.000.000,00 | penambahan pagu untuk pemeliharaan 2 atap gedung yang bocor dan perbaikan pagar |
| 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | OPD | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 34 unit | 50.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | OPD | Jumlah kendaraan yang dipelihara | 34 unit | 80.000.000,00 | penambahan pagu terkait perbaikan kendaraan roda 4 dan 2 yang tidak dapat digunakan/mogok (8 kendaraan) |
| 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | OPD | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 25 unit | 10.000.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | OPD | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 25 unit | 20.000.000,00 | penambahan pagu untuk pemeliharaan CCTV yang tidak berfungsi dan mesin genset yang sudah lama tidak berfungsi |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Jumlah Surat Teguran | - | - | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Jumlah Surat Teguran | - | - | |
| 21 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | OPD | Jumlah Pakaian Dinas | - | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | OPD | Jumlah Pakaian Dinas | - | - | |
| 22 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | OPD | Jumlah Pakaian Khusus | - | - | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | OPD | Jumlah Pakaian Khusus | - | - | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | 87,39 | 100.000.000,00 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | 87,39 | 100.000.000,00 | |
| 23 | Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur | Dalam dan Luar Daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | - | - | Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur | Dalam dan Luar Daerah | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | - | - | |
| 24 | Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah | OPD | Jumlah Inovasi | 1 inovasi | 100.000.000,00 | Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah | OPD | Jumlah Inovasi | 1 inovasi | 100.000.000,00 | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 100% | 294.600.000,00 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 100% | 367.480.000,00 | |
| | | | 1.Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | 100% | 144.600.000,00 | | | 1.Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | 100% | 217.480.000,00 | |
| 25 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir | OPD | Jumlah laporan keuangan | 5 dokumen | 45.000.000,00 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir | OPD | Jumlah laporan keuangan | 5 dokumen | 45.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | OPD | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | 3 dokumen | 82.800.000,00 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | OPD | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | 3 dokumen | 129.600.000,00 | penambahan pagu menyesuaikan dengan besaran pagu dan shbj untuk pengelolaan keuangan |
| 27 | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | OPD | Jumlah laporan barang milik daerah | 2 dokumen | 16.800.000,00 | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | OPD | Jumlah laporan barang milik daerah | 2 dokumen | 42.880.000,00 | penambahan pagu menyesuaikan dengan besaran pagu dan shbj untuk pengelolaan BMD |
| | | | 2.Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100% | 150.000.000,00 | | | 2.Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100% | 150.000.000,00 | |
| 28 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev | OPD | Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKjIP dan Monev | 6 dokumen | 150.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev | OPD | Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKjIP dan Monev | 6 dokumen | 150.000.000,00 | |
| | | | 3.Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit | - | - | | | 3.Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit | - | - | |
| 29 | Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat | OPD | Jumlah Laporan | - | - | Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat | OPD | Jumlah Laporan | - | - | |
| | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | 100% | 300.000.000,00 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | 100% | 575.000.000,00 | |
| | | | Cakupan penanganan konflik | 100% | 250.000.000,00 | | | Cakupan penanganan konflik | 100% | 500.000.000,00 | |
| 30 | Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah | Kabupaten Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penanganan Konflik | 250 laporan | 250.000.000,00 | Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah | Kabupaten Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penanganan Konflik | 350 laporan | 500.000.000,00 | penambahan pagu untuk peningkatan capaian kinerja program dan pembentukan tim wasdin kec. |
| 31 | Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme | - | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi | - | - | Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme | - | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi | - | - | |
| | | | Cakupan penanganan gejala masyarakat | 100% | 50.000.000,00 | | | Cakupan penanganan gejala masyarakat | 100% | 75.000.000,00 | |
| 32 | Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar | 15 kecamatan | Jumlah laporan Pemantauan | 15 Laporan | 50.000.000,00 | Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar | 15 kecamatan | Jumlah laporan Pemantauan | 18 Laporan | 75.000.000,00 | penambahan pagu terkait penambahan lokasi pemantauan |
| | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 100% | 2.518.667.600,00 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 100% | 1.880.567.600,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPd/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|--------------|--|----------------|----------------------|--|--------------|--|----------------|----------------------|--|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 1.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang | 100% | 2.518.667.600,00 | | | 1.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang | 100% | 1.880.567.600,00 | |
| 33 | Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan | 18 kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 2.522 orang | 1.218.667.600,00 | Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan | 18 kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 1.400 orang | 918.567.600,00 | pengurangan pagu terkait lokasi pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 |
| 34 | Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang | 5 kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 100 orang | 1.175.000.000,00 | Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang | 10 kecamatan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 200 orang | 887.000.000,00 | pengurangan pagu terkait dengan perubahan sub kegiatan dari sosialisasi di kec. menjadi diklat bela negara di kabupaten dengan menambah jumlah peserta |
| 35 | Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah | 9 kecamatan | Jumlah lokasi Pengawasan | 9 kecamatan | 50.000.000,00 | Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah | 9 kecamatan | Jumlah lokasi Pengawasan | - | - | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan adanya perpindahan wewenang pengawasan NGO |
| 36 | Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional | Kabupaten | Jumlah upacara | 3 upacara | 75.000.000,00 | Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional | Kabupaten | Jumlah upacara | 3 upacara | 75.000.000,00 | |
| | | | 2.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | - | - | | | 2.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | - | - | |
| 37 | Fasilitasi Ketahanan Budaya | 1 kecamatan | Jumlah peserta | - | - | Fasilitasi Ketahanan Budaya | 1 kecamatan | Jumlah peserta | - | - | |
| 38 | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah | 1 kecamatan | Jumlah yang difasilitasi | - | - | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah | 1 kecamatan | Jumlah yang difasilitasi | - | - | |
| | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | | Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat | 100% | 120.000.000,00 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | | Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat | 100% | 230.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|--------------|---|----------------|-------------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------|--|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya | 2 kecamatan | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 100 orang | 100.000.000,00 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya | 7 kecamatan | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 660 orang | 150.000.000,00 | penambahan pagu terkait penambahan peserta penyuluhan dan gagasan utk penyuluhan di sekolah-sekolah |
| 40 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi | 1 kecamatan | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | - | - | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi | 2 kecamatan | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 100 orang | 80.000.000,00 | penambahan pagu terkait mendukung capaian kinerja program dalam hal ketahanan ekonomi terkait maraknya kasus uang palsu di kukar |
| 41 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 18 kecamatan | Jumlah Dokumen | 18 dokumen | 20.000.000,00 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 18 kecamatan | Jumlah Dokumen | - | - | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain |
| | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | 1.910.000.000,00 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | 1.600.000.000,00 | |
| | | | 1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik | 100% | 1.610.000.000,00 | | | 1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik | 100% | 1.300.000.000,00 | |
| 42 | Pendidikan Politik Bagi Masyarakat | 10 kecamatan | Jumlah peserta | 1.000 orang | 800.000.000,00 | Pendidikan Politik Bagi Masyarakat | 10 kecamatan | Jumlah peserta | 1.000 orang | 800.000.000,00 | |
| 43 | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | 18 kecamatan | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | 200 laporan | 810.000.000,00 | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | 18 kecamatan | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | 150 laporan | 500.000.000,00 | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan pengurangan intensitas pelaporan dengan tidak adanya pemilu pada tahun 2021 |
| 44 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum | 18 kecamatan | Jumlah peserta dan laporan | - | - | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum | 18 kecamatan | Jumlah peserta dan laporan | - | - | |
| | | | 2. Persentase ormas yang tertib administrasi | 100% | 150.000.000,00 | | | 2. Persentase ormas yang tertib administrasi | 100% | 150.000.000,00 | |
| 45 | Fasilitasi organisasi kemasyarakatan | 18 kecamatan | Jumlah Ormas yang difasilitasi | 30 ormas | 50.000.000,00 | Fasilitasi organisasi kemasyarakatan | 18 kecamatan | Jumlah Ormas yang difasilitasi | 30 ormas | 50.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKP/RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|--|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah | Kabupaten Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 160 orang | 100.000.000,00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah | Kabupaten Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 160 orang | 100.000.000,00 | |
| | | | 3. Persentase parpol yang tertib administrasi | 100% | 150.000.000,00 | | | 3. Persentase parpol yang tertib administrasi | 100% | 150.000.000,00 | |
| 47 | Fasilitasi Partai Politik | Kabupaten | Jumlah parpol yang di fasilitasi | 16 Parpol | 75.000.000,00 | Fasilitasi Partai Politik | Kabupaten | Jumlah parpol yang di fasilitasi | 16 Parpol | 75.000.000,00 | |
| 48 | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas | Kabupaten | Jumlah peserta | 50 orang | 75.000.000,00 | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas | Kabupaten | Jumlah peserta | 50 orang | 75.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | | 6.480.625.600,89 | JUMLAH | | | | 6.480.625.600,89 | |



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,
YUNIAR ANANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2021 mengusung tema **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**

Dari visi dan agenda pembangunan tersebut, dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun agenda pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN tahun 2020 – 2024 tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari agenda pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 4 dan 7.



Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

| Aspek Kajian | Capaian/Kon disi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | Internal (Kewenang an OPD) | Eksternal (Diluar Kewenangan OPD) | |
| Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri | Masih kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan | Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan | Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar | Peraturan perundang-undangan yang berlaku | <ol style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat |



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara

Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

“Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat”

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja perubahan renstra perangkat daerah.



Tabel 3.1
TUJUAN OPD

| MISI 1 RPJMD | TUJUAN MISI 1 RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN |
|--|--|--|---|
| 1. Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat. | 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas melayani | 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah |
| | | 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB) |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

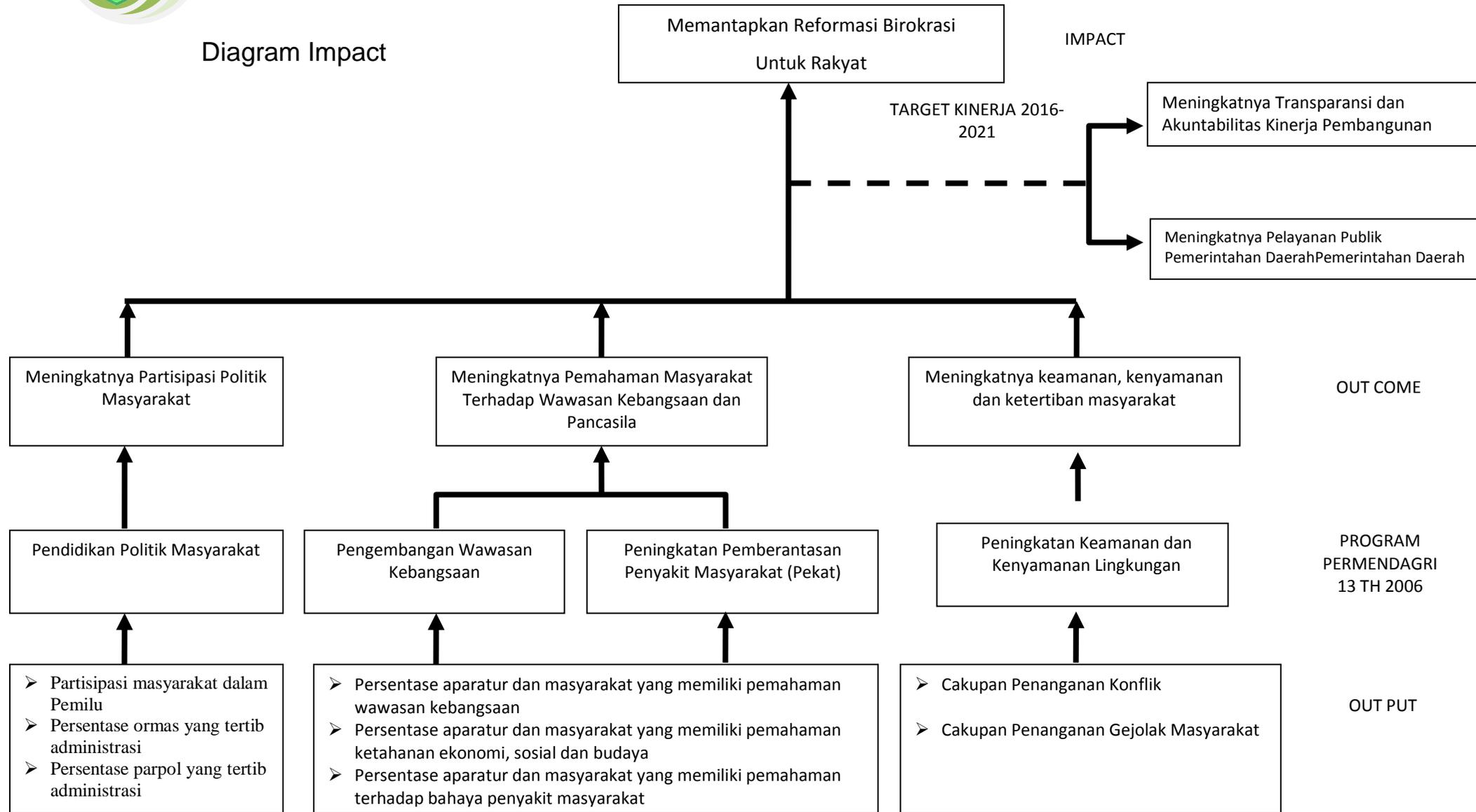
Tabel 3.2
SASARAN OPD

| SASARAN RPJMD | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN |
|---|--|--|
| 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. | Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. |
| 2. Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah | 1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat | Jumlah Konflik dan Gejolak |
| | 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila |
| | 3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Diagram Impact





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya.

Dalam rangka mengimplementasikan perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Sumber Data |
|----|---|--|--------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat | 1. Jumlah Konflik dan Gejolak | Kesbangpol, Kepolisian dan TNI |
| 2 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | 1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila | Kesbangpol dan Kepolisian |
| 3 | Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat | 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | Kesbangpol dan KPU |

Dalam tahun anggaran 2021 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Denga terbitnya peraturan baru terkait ormas dan partai politik, maka perlunya untuk memfasilitasi ormas dan parpol dalam permasalahan terkait hal tersebut
9. Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga diperlukan upaya pendidikan politik yang lebih lagi pasca gelaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana kerja tahunan tahun 2021 dan target kegiatan tahun 2021 tidak mengalami banyak perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2021 terdiri dari :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 4 program dan 14 kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 8 program dan 36 kegiatan

Kemudian penetapan program dan kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2021 disesuaikan dengan Rancangan awal RKPD tahun 2021 yang memuat program prioritas maka hal tersebut telah terakomodir ke dalam program dan kegiatan Badan Kesbangpol untuk perencanaan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2021

| Strategi RKPD | Arah Kebijakan RKPD | Program | Indikator |
|--|--|--|---|
| Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Penguatan Kapasitas Keamanan Lingkungan Berbasis Masyarakat | 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 1. Cakupan Penanganan Konflik |
| | | | 2. Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat |
| | | | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 2. Pendidikan Politik Masyarakat | 1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik |
| | | | 2. Persentase Ormas yang Tertib Administrasi |
| | | | 3. Persentase Parpol yang Tertib Administrasi |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

PROGRAM PRIORITAS RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| Strategi | Arah Kebijakan | Program | Indikator |
|--|--|---------------------------------|---|
| Peningkatan kualitas pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat | 1. Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang |
| | 2. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing | | 2. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud |
| | 3. Penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

| | | | |
|--|---|---|---|
| Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat | 1. Peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat |
| | 2. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika | | |



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1
 - Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
 - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
 - Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
 - Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Partai Politik
 - Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar
 - Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang
 - Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
 - Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang sosial budaya
 - Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas
 - Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional
 - b. Prioritas 2
 - Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah
 - Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Adapun perincian kegiatan tahun 2021 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | | 100% | 1.365.578.000,89 | APBD II | | 100% | 1.365.578.000,89 |
| 1 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | OPD | 500 lembar | 2.400.000,00 | APBD II | | 500 lembar | 2.400.000,00 |
| 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | OPD | 146 rekening | 130.000.000,00 | APBD II | | 146 rekening | 130.000.000,00 |
| 3 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | OPD | 42 unit | 13.050.000,18 | APBD II | | 42 unit | 13.050.000,18 |
| 4 | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | OPD | - | - | APBD II | | - | - |
| 5 | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan yang diperbaiki | OPD | 18 unit | 8.000.000,00 | APBD II | | 18 unit | 8.000.000,00 |
| 6 | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | OPD | 27 item | 35.741.472,08 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 27 item | 35.741.472,08 |
| 7 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak | OPD | 5 cetakan | 30.000.000,00 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 5 cetakan | 30.000.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | OPD | 113 buah | 5.000.000,27 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 113 buah | 5.000.000,27 |
| 9 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan | OPD | - | - | APBD II | | - | - |
| 10 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | OPD | 21 jenis barang | 8.000.000,04 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 21 jenis barang | 8.000.000,04 |
| 11 | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | OPD | 127 paket | 10.000.000,32 | APBD II | | 127 paket | 10.000.000,32 |
| 12 | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan rapat-rapat | OPD | 300 o/h | 510.000.000,00 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 300 o/h | 510.000.000,00 |
| 13 | | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Harian Lepas | OPD | 240 orang/bulan | 378.386.528,00 | APBD II | penambahan pagu terkait besaran upah THL sesuai surat edaran penyusunan RKA tahun 2020 | 240 orang/bulan | 378.386.528,00 |
| 14 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | OPD | 25 item | 35.000.000,00 | APBD II | pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain | 25 item | 35.000.000,00 |
| 15 | | Penataan Arsip Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Arsip | OPD | 2.200 dokumen | 200.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu sesuai instruksi bupati kuar untuk pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah | - | 200.000.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Jumlah Fasilitas Pendukung Penataan Arsip | | - | | | | - | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik | | 88% | 362.000.000,00 | APBD II | | 88% | 362.000.000,00 |
| 16 | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | OPD | 4 unit | 35.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu terkait pengadaan AC untuk mengganti AC yang sudah rusak | - | 35.000.000,00 |
| 17 | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | OPD | 18 unit | 127.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu untuk pengadaan PC dan printer/scanner yang masih kurang | - | 127.000.000,00 |
| 18 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | OPD | 2 unit gedung | 100.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu untuk pemeliharaan 2 atap gedung yang bocor dan perbaikan pagar | 2 unit gedung | 100.000.000,00 |
| 19 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara | OPD | 34 unit | 80.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu terkait perbaikan kendaraan roda 4 dan 2 yang tidak dapat digunakan/mogok (8 kendaraan) | 34 unit | 80.000.000,00 |
| 20 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | OPD | 25 unit | 20.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu untuk pemeliharaan CCTV yang tidak berfungsi dan mesin genset yang sudah lama tidak berfungsi | 25 unit | 20.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Surat Teguran | | - | - | APBD II | | - | - |
| 21 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | OPD | - | - | APBD II | | - | - |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus | OPD | - | - | APBD II | | - | - |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rata-Rata Nilai Kinerja SKP | | 87,39 | 100.000.000,00 | APBD II | | 87,39 | 100.000.000,00 |
| 23 | | Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | Dalam dan Luar Daerah | - | - | APBD II | | - | - |
| 24 | | Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah | Jumlah Inovasi | OPD | 1 inovasi | 100.000.000,00 | APBD II | | 1 inovasi | 100.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | 100% | 367.480.000,00 | APBD II | | 100% | 367.480.000,00 |
| | | | 1.Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | | 100% | 217.480.000,00 | APBD II | | 100% | 217.480.000,00 |
| 25 | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir | Jumlah laporan keuangan | OPD | 5 dokumen | 45.000.000,00 | APBD II | | 5 dokumen | 45.000.000,00 |
| 26 | | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | OPD | 3 dokumen | 129.600.000,00 | APBD II | penambahan pagu menyesuaikan dengan besaran pagu dan shbj untuk pengelolaan keuangan | 3 dokumen | 129.600.000,00 |
| 27 | | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah | OPD | 2 dokumen | 42.880.000,00 | APBD II | penambahan pagu menyesuaikan dengan besaran pagu dan shbj untuk pengelolaan BMD | 2 dokumen | 42.880.000,00 |
| | | | 2.Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | | 100% | 150.000.000,00 | APBD II | | 100% | 150.000.000,00 |
| 28 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev | Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJIP dan Monev | OPD | 6 dokumen | 150.000.000,00 | APBD II | | 6 dokumen | 150.000.000,00 |
| | | | 3.Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit | | - | - | APBD II | | - | - |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | | Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat | Jumlah Laporan | OPD | - | - | APBD II | | - | - |
| | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | 100% | 575.000.000,00 | APBD II | | 100% | 575.000.000,00 |
| | | | Cakupan penanganan konflik | | 100% | 500.000.000,00 | APBD II | | 100% | 500.000.000,00 |
| 30 | | Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah | Jumlah Laporan Penanganan Konflik | Kabupaten Kutai Kartanegara | 350 laporan | 500.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu untuk peningkatan capaian kinerja program dan pembentukan tim wasdin kec. | 350 laporan | 500.000.000,00 |
| 31 | | Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi | - | - | - | APBD II | | - | - |
| | | | Cakupan penanganan gejala masyarakat | | 100% | 75.000.000,00 | APBD II | | 100% | 75.000.000,00 |
| 32 | | Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar | Jumlah laporan Pemantauan | 15 kecamatan | 18 Laporan | 75.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu terkait penambahan lokasi pemantauan | 18 Laporan | 75.000.000,00 |
| | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | 100% | 1.880.567.600,00 | APBD II | | 100% | 1.880.567.600,00 |
| | | | 1.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang | | 100% | 1.880.567.600,00 | APBD II | | 100% | 1.880.567.600,00 |
| 33 | | Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 18 kecamatan | 1.400 orang | 918.567.600,00 | APBD II | pengurangan pagu terkait lokasi pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 | 1.400 orang | 918.567.600,00 |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | | Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan | 10 kecamatan | 200 orang | 887.000.000,00 | APBD II | pengurangan pagu terkait dengan perubahan sub kegiatan dari sosialisasi di kec. menjadi diklat bela negara di kabupaten dengan menambah jumlah peserta | 200 orang | 887.000.000,00 |
| 35 | | Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah | Jumlah lokasi Pengawasan | 9 kecamatan | - | - | APBD II | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan adanya perpindahan wewenang pengawasan NGO | - | - |
| 36 | | Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional | Jumlah upacara | Kabupaten | 3 kegiatan | 75.000.000,00 | APBD II | | 3 kegiatan | 75.000.000,00 |
| | | | 2.Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | | - | - | APBD II | | - | - |
| 37 | | Fasilitasi Ketahanan Budaya | Jumlah peserta | 1 kecamatan | - | - | APBD II | | - | - |
| 38 | | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah | Jumlah yang difasilitasi | 1 kecamatan | - | - | APBD II | | - | - |
| | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat | | 100% | 230.000.000,00 | APBD II | | 100% | 230.000.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 2 kecamatan | 660 orang | 150.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu terkait penambahan peserta penyuluhan dan gagasan utk penyuluhan di sekolah-sekolah | 660 orang | 150.000.000,00 |
| 40 | | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Ekonomi | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 2 kecamatan | 100 orang | 80.000.000,00 | APBD II | penambahan pagu terkait mendukung capaian kinerja program dalam hal ketahanan ekonomi terkait maraknya kasus uang palsu di kukar | 100 orang | 80.000.000,00 |
| 41 | | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Jumlah Dokumen | 18 kecamatan | - | - | APBD II | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja | - | - |
| | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | 1.600.000.000,00 | APBD II | | | 1.600.000.000,00 |
| | | | 1. Persentase pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap politik | | 100% | 1.300.000.000,00 | APBD II | | 100% | 1.300.000.000,00 |
| 42 | | Pendidikan Politik Bagi Masyarakat | Jumlah peserta | 10 kecamatan | 1.000 orang | 800.000.000,00 | APBD II | | 1.000 orang | 800.000.000,00 |
| 43 | | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | 18 kecamatan | 150 laporan | 500.000.000,00 | APBD II | pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan | 150 laporan | 500.000.000,00 |
| 44 | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum | Jumlah peserta dan laporan | 18 kecamatan | - | - | APBD II | | - | - |
| | | | 2. Persentase ormas yang tertib administrasi | | 100% | 150.000.000,00 | APBD II | | 100% | 150.000.000,00 |
| 45 | | Fasilitasi organisasi kemasyarakatan | Jumlah Ormas yang difasilitasi | 18 kecamatan | 30 ormas | 50.000.000,00 | APBD II | | 30 ormas | 50.000.000,00 |
| 46 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah | Jumlah peserta | Kabupaten Kutai Kartanegara | 160 orang | 100.000.000,00 | APBD II | | 160 orang | 100.000.000,00 |

| NO | KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | |
|----|------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 3. Persentase parpol yang tertib administrasi | | 100% | 150.000.000,00 | APBD II | | 100% | 150.000.000,00 |
| 47 | | Fasilitasi Partai Politik | Jumlah parpol yang di fasilitasi | Kabupaten | 16 Parpol | 75.000.000,00 | APBD II | | 16 Parpol | 75.000.000,00 |
| 48 | | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas | Jumlah peserta | Kabupaten | 50 orang | 75.000.000,00 | APBD II | | 50 orang | 75.000.000,00 |
| | | JUMLAH | | | | 6.480.625.600,89 | | | | 6.480.625.600,89 |



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kartanegara,
RINDA DEWIATI, S.Sos.,M.Si
NIP. 196507282001122002

| Renstra Perangkat Daerah | | | | Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 | | | | Program | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Kode Simral | Nomenklatur | Indikator Program/kegiatan | Indikator Kegiatan | Kode | Sub Kegiatan Nomenklatur | Indikator (Sub Output) | Nomenklatur Kegiatan | Indikator (Output) | Nomenklatur Program | Indikator (Outcome) | Analisis |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN : NON URUSAN (GENERIK) | | | | | | | | | | |
| 0000.06 | Program Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Asset | | | | | | | | | | |
| 0000.06.022 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir | Jumlah laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | xx 01 2.02 07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Dokumen Laporan | | | | | |
| 0000.06.013 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | Jumlah laporan kinerja keuangan kegiatan | xx 01 2.02 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Laporan | | | | | |
| 0000.06.014 | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah | Jumlah laporan barang milik daerah | xx 01 2.02 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan | | | | | |
| 0000.06.017 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Money | Persentase Konstansi RENSTRA dan RENJA | Jumlah dokumen RKT/Renja, LPP, LKPU, LKJP dan Money | xx 01 2.01 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | | | | | |
| | | | | xx 01 2.01 02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA/DPA | | | | | |
| | | | | xx 01 2.01 03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi | | | | | |
| | | | | xx 01 2.01 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | | | | | |
| 0000.06.031 | Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat | Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit | Jumlah Laporan | xx 01 2.02 05 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan | Jumlah Laporan | | | | | |
| 0000.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 0000.01.015 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | xx 01 2.03 01 | | | | | | | |
| 0000.01.016 | Penataan Arsip Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Arsip | Jumlah Dokumen Arsip | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0000.01.001 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | xx 01 2.03 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| 0000.01.003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | xx 01 2.03 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | |

| Renstra Perangkat Daerah | | | | Nomenklatur Perundangri No. 90 Tahun 2019 | | | | Program | | Analisis |
|--------------------------|---|--|-----------------|---|--|---|---|--|--|--|
| Program/Kegiatan | | Sub Kegiatan | | Kegiatan | | Program | | Indikator (Outcome) | | |
| Kode Simbol | Nomenklatur | Indikator Program/Kegiatan | Kode | Nomenklatur | Indikator (Sub Output) | Nomenklatur | Indikator (Output) | | Nomenklatur | Indikator (Outcome) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 21.002 | Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | 8 01 03 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1.) Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik. 2) Persentase parpol yang tertib administrasi. 3) Jumlah laporan money | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | Upaya yang dilakukan untuk perbaikan iklim demokrasi di daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi serta fasilitasi terhadap lembaga demokrasi |
| 21.006 | Fasilitasi Partai Politik | Persentase parpol yang tertib administrasi | 8 01 03 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah parpol yang monitoring dan evaluasi | | | | | |
| 21.007 | Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas | Jumlah peserta | | | Jumlah parpol yang difasilitasi | | | | | |
| 21.010 | Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan | Persentase ormas yang tertib administrasi | 8 01 04 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, | 1) Jumlah Ormas yang difasilitasi | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang | Jumlah dokumen | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | Persentase ormas yang | Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan daerah melalui inisiatif |

| Renstra Perangkat Daerah | | Momenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|--|---|--|--------------------|--|--|---|----------|
| Kode Simbol | Nomenklatur | Indikator Program/kegiatan | Sub Kegiatan | | | Kegiatan | | | Program | | Analisis |
| | | | Kode | Nomenklatur | Indikator (Sub Output) | Nomenklatur | Indikator (Output) | Momenklatur | Indikator (Outcome) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| 20.001 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | 8 01 05 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/ Penyuluhan | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah dokumen | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud | | |
| 20.003 | Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Ekonomi | Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan | | | | | | | | | |
| 20.004 | Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika | Jumlah Dokumen | 8 01 05 2.01 03 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen | | | | | | |





BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2021. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2021, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2016 – 2021 khususnya untuk tahun kelima pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2021 secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

Terdapat beberapa catatan penting terkait proses rewiu Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan OPD yang menimbulkan perbedaan dalam proses tersebut yang akan ditindaklanjuti pada pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. pengurangan volume barang dan pagu untuk mendukung target kinerja pada kegiatan lain
- b. penambahan pagu terkait besaran upah THL sesuai surat edaran penyusunan RKA tahun 2020
- c. penambahan pagu sesuai instruksi bupati kukar untuk pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah
- d. penambahan pagu terkait pengadaan AC untuk mengganti AC yang sudah rusak
- e. penambahan pagu untuk pengadaan PC dan printer/scanner yang masih kurang



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- f. penambahan pagu untuk pemeliharaan 2 atap gedung yang bocor dan perbaikan pagar
- g. penambahan pagu terkait perbaikan kendaraan roda 4 dan 2 yang tidak dapat digunakan/mogok (8 kendaraan)
- h. penambahan pagu untuk pemeliharaan CCTV yang tidak berfungsi dan mesin genset yang sudah lama tidak berfungsi
- i. penambahan pagu menyesuaikan dengan besaran pagu dan shbj untuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- j. penambahan pagu untuk peningkatan capaian kinerja program dan pembentukan tim wasdin kec.
- k. penambahan pagu terkait penambahan lokasi pemantauan hingga desa
- l. pengurangan pagu terkait lokasi pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020
- m. pengurangan pagu terkait dengan perubahan sub kegiatan dari sosialisasi di kec. menjadi diklat bela negara di kabupaten dengan menambah jumlah peserta
- n. pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan adanya perpindahan wewenang pengawasan NGO
- o. penambahan pagu terkait penambahan peserta penyuluhan dan gagasan utk penyuluhan di sekolah-sekolah
- p. penambahan pagu terkait mendukung capaian kinerja program dalam hal ketahanan ekonomi terkait maraknya kasus uang palsu di kukar
- q. pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan belum adanya payung hukum berupa perda untuk kegiatan ini



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- r. pengurangan pagu untuk mendukung capaian kinerja kegiatan lain dan pengurangan intensitas pelaporan dengan tidak adanya pemilu pada tahun 2021

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Renja Badan Kesbangpol tahun 2021 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1
 - Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
 - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

- Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
- Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
- Fasilitasi Partai Politik
- Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar
- Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang
- Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
- Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat di bidang sosial budaya
- Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas
- Peringatan Hari-Hari Besar/Nasional

b. Prioritas 2

- Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah
- Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, Juni 2020
**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,**

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002